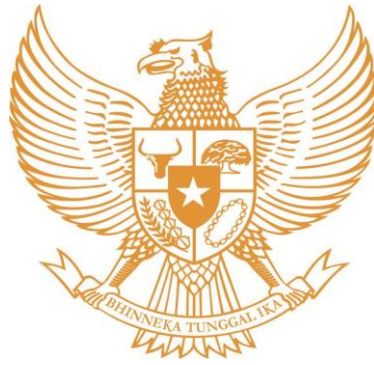




RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BOGOR

2019 - 2024



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebelumnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 163 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah Kota dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota di masa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah Kota.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kota/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kota/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi

isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Sebelum Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik

dan Persandian Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

SEKRETARIAT
DAERAH

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 42 Tahun 2022

TANGGAL : 3 Juni 2022

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019–2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan era teknologi informasi yang sangat cepat membawa implikasi yang sangat luas pada segenap aspek kehidupan masyarakat. Percepatan pertukaran informasi, peningkatan tuntutan layanan publik yang lebih efisien, keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan mendorong penerapan konsep kota cerdas (*smart city*) guna menjawab tantangan tersebut.

Dalam rangka menuju dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk aktif memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disegala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas dibidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke wilayah pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan peran TIK dapat menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah kepadapublik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik menjadi garda terdepan untuk mengkoordinasikan implementasi smart city. Dalam rangka mengawal

program *smart city*, perlu disusun dokumen perencanaan untuk melaksanakan tugasnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bogor serta mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Kominfo, Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024. Seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pada triwulan pertama tahun 2020 telah terjadi pandemi covid-19 yang sangat berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana program pembangunan di Kota Bogor pada tahun 2020 maupun tahun tahun berikutnya, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 baik dalam hal arah kebijakan, strategi maupun prioritas pembangunan daerah kota Bogor di sisa masa berlaku RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

Selain itu, dinamika perubahan kebijakan nasional yang ada setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, juga berdampak terhadap perlunya penyesuaian penyesuaian baik dari sisi regulasi maupun arah kebijakan. Sehingga ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 342 mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Dengan berubahnya RPJMD Kota Bogor, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Disamping adanya perubahan RPJMD Kota Bogor, Renja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renstra Diskominfo Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
 30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
 33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2

- Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: (6/133/2021);
 36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: (5/49/2022);
 38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
 39. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 59 Seri E);
 40. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 57 Seri E);
 41. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
 42. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 163 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 163).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan perubahan perencanaan strategis 2019-2024 adalah untuk penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sisa kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai berikut:

1. Menetapkan perubahan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Bogor dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dibidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor. Sejalan dengan perubahan RPJMD pada tahun 2022, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 163 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Adapun tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang terbaru adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.

3. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Statistik Sektoral;
- b. penyusunan rencana kerja di Bidang Statistik Sektoral;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Statistik Sektoral;

- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Statistik Sektoral;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Statistik Sektoral;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Statistik Sektoral; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyusunan rencana kerja di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian

Bidang Jaringan, Domain dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Jaringan, Domain dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
- b. penyusunan rencana kerja di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Jaringan, Domain dan Persandian; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang *e-Government*

Bidang *e-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang *e-Government*.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang *e-Government* mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di bidang *e-Government*;
- b. penyusunan rencana kerja di bidang *e-Government*;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang *e-Government*;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang *e-Government*;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang *e-Government*;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di *e-Government*; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Kelompok Substansi

Jabatan Fungsional dikelompokkan ke dalam Kelompok Substansi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.

Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pada satu Kelompok Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kebutuhan Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 18 Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian termasuk ke dalam Dinas Tipe A.

Sejalan dengan Perubahan Renstra pada tahun 2022, maka Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk ke dalam Dinas Tipe A. Perbandingan struktur organisasi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

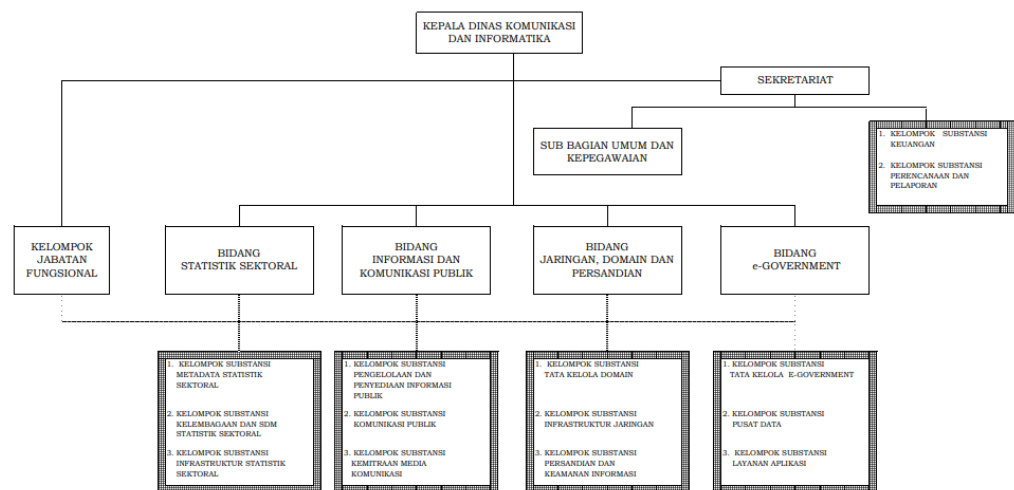
Tabel 2.1
Perbandingan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda No.7 Tahun 2016 dan Perda No. 3 Tahun 2021

Perda No.7 Tahun 2016	Perda No. 3 Tahun 2021
<p>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretariat, membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; <p>c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; 3. Seksi Kemitraan Media Publik; <p>d. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Infrastruktur Jaringan; 2. Seksi Infrastruktur Pusat Data; 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; <p>e. Bidang Layanan e-Government, membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi; 2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government; 3. Seksi Tata Kelola e-Government; <p>f. Bidang Statistik Sektoral, membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Kompilasi Data; 2. Seksi Pengolahan Data; 3. Seksi Penyajian Data; <p>g. Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretariat membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kelompok Substansi Keuangan; 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan; <p>c. Bidang Statistik Sektoral membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Substansi Metadata Statistik Sektoral; 2. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Statistik Sektoral; 3. Kelompok Substansi Infrastruktur Statistik Sektoral; <p>d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Substansi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik; 2. Kelompok Substansi Komunikasi Publik; 3. Kelompok Substansi Kemitraan Media Komunikasi; <p>e. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Substansi Tata Kelola Domain; 2. Kelompok Substansi Infrastruktur Jaringan; 3. Kelompok Substansi Persandian dan Keamanan Informasi; <p>f. Bidang E-government membawahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Substansi Tata Kelola e-Government; 2. Kelompok Substansi Pusat Data; 3. Kelompok Substansi Layanan

Perda No.7 Tahun 2016	Perda No. 3 Tahun 2021
	Aplikasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
(Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah)



Sumber : Diskominfo Tahun 2022

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, dan Informatika didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

1. Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Perempuan	Laki-laki
Kepala Dinas		1
Sekretaris	1	
Kepala Bidang	1	3
Kepala Seksi/Sub Bagian	4	10
Jabatan Fungsional Tertentu		5
Pelaksana	13	18
JUMLAH TOTAL	19	32
	51	

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

2. Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan

No	Jabatan Pegawai	Eselon	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jumlah
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas	IIa															1		1
2	Sekretaris	IIIa														1			1
3	Kepala Bidang	IIIb													4				4
4	Kepala Sub Bagian	IVa											1	2					3
5	Kepala Seksi	IVa											3	7	1				11
6	Jabatan Fungsional Tertentu	-									1	2	2						5
7	Pelaksana	-						6	1	8	7	2	2					26	
Jumlah								6	1	9	9	8	11	5	1	1		51	

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

3. Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan:

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

Jabatan Pegawai	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	S3	
Kepala Dinas								1		1
Sekretaris								1		1
Kepala Bidang							1	3		4
Kepala Seksi/ Sub Bagian							7	7		14
Jabatan Fungsional Tertentu					2		3			5
Pelaksana			4		6		14	2		26
TOTAL										51

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

4. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor:

Tabel 2.5
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 1 Tahun 2019)			Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala	1	-	-	1	-	1	-
2	Sekretaris Bidang	1	-	-	1	-	1	-
	2.1.Kepala Sub Bagian Keuangan	1	-	-	1	-	1	-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 1 Tahun 2019)			Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	2.1.1. Bendahara Pengeluaran	1	-	-	1	-	1	-
	2.1.2. Verifikator Data Laporan Keuangan	1	-	-	2	-	2	-
	2.1.3. Administrasi Keuangan	1	-	-	-	-	-	-
	2.1.4. Pengelola Keuangan	-	-	-	1	-	1	-
	2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	-	-	1	-	1	-
	2.2.1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	-	1	1	1	1
	2.2.2. Pengelola Bahan Perencanaan	-	-	-	1	1	1	1
	2.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	-	1	-	1	-
	2.3.1. Analis Kepegawaian	-	-	-	1	-	1	-
	2.3.2. Analis SDM Aparatur	-	-	-	1	-	1	-
	2.3.3. Pengelola Rumah Tangga	1	-	2	1	2	1	2
	2.3.4. Pengelola BMD	2	-	-	2	-	2	-
	2.3.5. Pengadministrasian Umum	1	-	-	2	-	2	-
3	Kepala Bidang Statistik Sektoral	1	-	-	1	-	1	-
	3.1. Kepala Seksi Kompilasi Data	1	-	-	1	-	1	-
	3.1.1. Analis Statistik	1	-	-	1	-	1	-
	3.1.2. Analis Sistem Informasi	-	-	-	1	2	1	2
	3.1.3. Pengolah Data	1	-	-	1	-	1	-
	3.1.4. Operator BGR		-	4		4		4
	3.2. Kepala Seksi Pengolahan Data	1	-	-	1	-	1	-
	3.2.1. Analisis Statistik	1	-	-	1	-	1	-
	3.2.2. Analis Sistem Informasi	-	-	-	1	2	1	2
	3.2.3. Pengolah Data	-	-	-	1	-	1	-
	3.3. Kepala Seksi Penyajian Data	1	-	-	1	-	1	-
	3.3.1. Analisis Statistik		-	-	1	-	1	-
	3.3.2. Analisis Sistem Informasi	-	-	-	1	2	1	2

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 1 Tahun 2019)			Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	3.3.3.Pengolah Data	-	-	-	1	-	1	-
	3.3.4.Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	-	-	-	1	-	1	-
	3.3.5.Tekhnisi CCTV	-	-	2		2		2
4	Kepala Bidang Layanan e-Government	1	-	-	1	-	1	-
	4.1.Kasi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi	1	-	-	1	-	1	-
	4.1.1.Pengelola Situs/Web	1	-	-	4	-	3	-
	4.1.2.Pengelola Sistem dan Jaringan	-	-	-	1	-	1	-
	4.1.3.Pengelola Data	-	-	-	6	-	6	-
	4.1.4.Analisis Sistem Informasi	1	-	-	5	-	4	-
	4.1.5.Programmer	-	-	3	-	3	-	3
	4.1.6.Designer	-	-	3	-	3	-	3
	4.1.7.Surveyor		-	3	-	3	-	3
	4.2. Kasi Tata Kelola e-Government	1	-	-	1	-	1	-
	4.2.1. Analis Sistem Informasi dan di Desiminasi	-	-	-	1	-	1	-
	4.2.2. Pengelola Data.	-	-	-	1	1	1	1
	4.3.Kasi Pengembangan Ekosistem e-Government	1	-	-	1	-	1	-
	4.3.1.Analis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum	-	-	-	1	-	1	-
	4.3.2.Pengolah Data		-	-	1	2	1	2
5	Kepala Bidang Teknologi Informasi	1	-	-	1	-	1	-
	5.1. Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan	1	-	-	1	-	1	-
	5.1.1.Pengendali Jaringan Komunikasi	-	-	-	1	-	1	-
	5.1.2.Pengelola Sistem dan Jaringan	1	-	6	1	-	2	-
	5.1.3.Pengelola Teknologi Informasi	1	-	-	1	-	1	-
	5.1.4.Tekhnisi Alat Elektro dan Alat	-	-	-	1	-	1	-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 1 Tahun 2019)			Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	Komunikasi							
	5.2.Kepala Seksi Infrastruktur Pusat Data	1	-	-	1	-	1	-
	5.2.1. Analis	-	-	-	1	-	1	-
	5.2.2.Pengolah Data	-	-	-	2	2	2	2
	5.2.3.Pengendali Teknologi Informasi	-	-	-	3	6	3	6
	5.3.Kepala Seksi Keamanan Informasi & Persandian	1	-	-	1	-	1	-
	5.3.1. Analis Persandian	-	-	-	1	-	1	-
	5.3.2.Pengelola Keamanan Sistem Informasi	1	-	-	1	-	1	-
	5.3.3.Operator Sandi	1	-	-	1	-	1	-
6	Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik	1	-	-	1	-	1	-
	6.1.Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	1	-	-	1	-	1	-
	6.1.1.Analis Berita	-	-	-	2	-	2	-
	6.1.2.Pengelola Informasi	-	-	-	1	-	1	-
	6.1.3.Verifikator	-	-	12	-	12		12
	6.2.Kepala Seksi Kemitraan Media Publik	1	-	-	1	-	1	-
	6.2.1.Analis System Informasi dan Diseminasi Hukum	1	-	-	2	-	2	-
	6.2.2.Pengelola TV dan Radio	3	-	8	-	8	-	8
	6.2.3.Analis Publikasi	-	-	-	2	-	2	-
	6.2.4.Analis Kemitraan	-	-	-	2	-	2	-
	6.2.5.Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	-	-	-	3	-	3	-
	6.2.6.Pengadministrasian Analis & Kemitraan Media	-	-	-	2	-	2	-
	6.2.7.Penyiar	-	-	-	2	4	2	4
	6.2.8.Peliput	-	-	-	2	4	2	4
	6.2.9.Editing	-	-	-	2	4	2	4
	6.2.10.Operator	-	-	-		2		2

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM (s.d Semester 1 Tahun 2019)			Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	6.3.Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	1	-	-	1	-	1	-
	6.3.1. Analis Berita	-	-	-	2	-	2	-
	6.3.2. Pengelola Website dan Media Sosial	-	-	-	2	-	2	-
	6.3.3. Konten Kreator	-	-	-	3	-	3	-

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

5. Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Tabel 2.6
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019)			RencanaJml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya	Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya
1	Kepala	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris Bidang	-	-	-	1	1	1
	2.1.Kepala Sub Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	-
	2.1.1.Bendahara Pengeluaran	-	-	-	1	-	1
	2.1.2.Verifikator Data Laporan Keuangan	-	-	-	1	-	1
	2.1.3.Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-	-
	2.1.4.Pengelola Keuangan	1	-	-	1	-	1
	2.2.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	-	-	1	1	-	1
	2.2.1.Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	1	-	1
	2.2.2.Pengelola Bahan Perencanaan	-	-	-	1	-	1
	2.3.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	-

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019)			RencanaJml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya	Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya
	2.3.1. Analis Kepegawaian	-	-	-	1	-	1
	2.3.2. Analis SDM Aparatur	-	-	-	1	-	1
	2.3.3. Pengelola Rumah Tangga	-	-	-	1	-	1
	2.3.4. Pengelola BMD	-	-	-	1	-	1
	2.3.5. Pengadmimistrasian Umum	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang Statistik Sektor	-	1	1	1	-	1
	3.1. Kepala Seksi Kompilasi Data	1	1	-	1	-	1
	3.1.1, Analis Statistik	-	-	-	1	1	1
	3.1.2 Analis Sistem Informasi	-	-	-	1	1	1
	3.1.3. Pengolah Data	1	-	-	-	1	1
	3.2. Kepala Seksi Pengolahan Data	-	-	-	1	1	1
	3.2.1. Analisis Statistik	-	-	-	1	-	1
	3.2.2. Analisis Sistem Informasi	-	-	-	1	-	1
	3.2.3. Pengolah Data	-	-	-	1	-	1
	3.3. Kepala Seksi Penyajian Data	-	-	-	1	1	1
	3.3.1. Analisis Statistik	-	-	-	1	-	1
	3.3.2. Analisis Sistem Informasi	-	-	-	1	-	1
	3.3.3. Pengolah Data	-	-	-	1	-	1
	3.3.4. Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	-	-	-	1	-	1
4	Kepala Bidang Layanan dan E-government	-	-	-	1	1	1
	4.1. Kasi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi	-	1	-	2	-	4
	4.1.1. Pengelola Situs/Web	-	-	-	4	-	4
	4.1.2. Pengelola Sistem dan Jaringan	-	-	-	1	-	1
	4.1.3. Pengelola Data	-	-	-	6	-	6
	4.1.4. Analisis Sistem Informasi	-	-	-	5	-	5
	4.1.5. Programmer	-	-	-	-	-	3

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019)			RencanaJml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya	Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya
	4.1.6.Designer	-	-	-	-	-	3
	4.1.7.Surveyor	-	-	-	-	-	3
	4.2. Kasi Tata Kelola E-Government	-	1	-	-	1	-
	4.2.1. Analis Sistem Informasi dan Desiminasi	-	-	-	1	-	1
	4.2.2. Pengelola Data.	-		-	1		1
	4.3.Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government	-	1	-	1	1	1
	4.3.1.Analis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum	-	-	-	1	-	3
	4.3.2.Pengolah Data	-	-	-	1	-	3
5	Kepala Bidang Teknologi Informasi	-	-	-	1	1	1
	5.1. Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan	-	-	-	1	1	1
	5.1.1.Pengendali Jaringan Komunikasi	-	-	-	1	-	1
	5.1.2.Pengelola Sistem dan Jaringan	-	1	-	2	-	2
	5.1.3.Pengelola Teknologi Informasi	-	1	-	1	-	1
	5.1.4.Tekhnisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	-	-	-	1	-	1
	5.2.Kepala Seksi Infrastruktur Pusat Data	-	-	-	1	1	1
	5.2.1. Analis	-	-	-	1	-	-
	5.2.2.Pengolah Data	-	-	-	2	-	2
	5.2.3.Pengendali Teknologi Informasi	-	-	-	3	-	6
	5.3.Kepala Seksi Keamanan Informasi & Persandian	-	-	-	1	1	1
	5.3.1. Analis Persandian	-	-	-	1		1
	5.3.2.Pengelola Keamanan Sistem Informasi	-	-	-	1		1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019)			RencanaJml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya	Fungsional	Struktural	Tehnis Lainnya
	5.3.3.Operator Sandi	-	-	-	1		1
6	Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik	-	-	-	1	1	1
	6.1.Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	1	-	-	1	1	1
	6.1.1.Analis Berita	-	-	-	1	-	1
	6.1.2.Pengelola Informasi	-	-	-	1	-	1
	6.1.3.Verifikator	-	-	-	1	-	1
	6.2.Kepala Seksi Kemitraan Media Publik	-	1	1	1	-	1
	6.2.1.Analis System Informasi dan Diseminasi Hukum	-	-	-	1	-	1
	6.2.2.Pengelola TV dan Radio	-	-	3	3	-	3
	6.2.3.Analis Publikasi	-	-	-	1	-	1
	6.2.4.Analis Kemitraan	-	-	-	1	-	1
	6.2.5.Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	-	-	-	1	-	1
	6.2.6.Pengadministrasian Analis & Kemitraan Media	-	-	-	1	-	1
	6.2.7.Penyiar	-	-	-	1	-	1
	6.2.8.Peliput	-	-	-	1	-	1
	6.2.9.Editing	-	-	-	1	-	1
	6.2.10.Operator	-	-	-	1	-	1
	6.3.Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	1	-	-	1	1	1
	6.3.1. Analis Berita	-	-	-	2	-	-
	6.3.2. Pengelola Website dan Media Sosial	-	-	-	2	-	-
	6.3.3. Konten Kreator	-	-	-	3	-	-

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	6	unit
2	Kendaraan Roda 2 Matic 150 cc	9	unit
3	PC	54	unit
4	Laptop core i3	2	unit
5	Printer inkjet	6	unit
6	AC	20	unit
7	Mesin Tik Elektrik	2	unit
8	Mesin Penghancur	2	unit
9	Dispenser	4	unit
10	Kulkas 2 Pintu	2	unit
11	Vacuum Cleaner 1000 watt	2	unit
12	Lemari Besi	2	unit
13	Filling Cabinet	5	unit
14	Kursi Kerja Putar	34	unit
15	Meja Kerja	40	unit
16	Kursi Tamu	2	unit
17	Laptop core i7	1	unit
18	Laptop core i5	1	unit
19	Laptop (berbagai merk)	13	unit
20	Hardisk External	4	unit
21	Monitor 21.5	1	unit
22	Proyektor	4	unit
23	Layar Proyektor	3	unit
24	Lemari Rak Arsip Kayu	17	unit
25	Anjungan Informasi Publik	18	unit
26	Server	12	Paket
27	Genset	1	unit
28	CCTV Taman Kota	7	unit
29	CCTV Monitoring	34	unit
30	Handy Talky	23	unit
31	Drone	3	unit
32	Action Camera	1	unit
33	Camera	3	unit
34	Tripod	5	unit
35	Printer Epson	14	unit
36	Lemari Locker	1	unit
37	Microphone Headseat	17	unit
38	Anti Virus Sophos	1	Paket
39	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur Bogor Barat dan Jalur Kelurahan Loji	1	Paket
40	Jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur TanahSareal Rute Sukaesmi-Sukadamai	1	Paket

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
41	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure Cipaku – Pamoyanan	1	Paket
42	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Rute Cibuluh - Tanah Baru	1	Paket
43	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure PUPR dan BPKSDA (Gedung Baru)	1	Paket
56	Notebook	4	Unit

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

Tabel 2.8
Rencana Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH KONDISI SAAT INI			JUMLAH RENCANA PEMELIHARAAN					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Gedung Untuk Kantor Baru	1	-	-	-	1	1	1	1	1
2	Mobil	6	-	-	6	6	6	6	6	6
3	Sepeda Motor	8	-	-	8	8	8	8	8	8
4	PenghancurKertas	1	1	-	1	2	3	4	5	1
5	Meja	51	4	11	51	51	51	51	51	51
6	Kursi Sandaran Sedang	61	1	16	61	61	61	61	61	61
7	PenghancurKertas	1	1	-	1	1	1	1	1	1
8	LemariBesi	3	-	-	3	3	3	3	3	3
9	Filling Kabinet	5	-	-	5	5	5	5	5	5
10	RakArsipBesi	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AC	18	-	2	18	18	18	18	18	18
12	Lemari Pendingin /Kulkas	3	-	-	3	3	3	3	3	3
13	Dispenser	3	-	1	3	3	3	3	3	3
14	Lemari Kayu	12	-	1	12	12	12	12	12	12
15	KursiHadap	10	-	-	10	10	10	10	10	10
16	Personal Komputer	52	2	7	52	52	52	52	52	52
17	Laptop	11	1	1	11	11	11	11	11	11
18	Printer Scanner	17	-	1	17	17	17	17	17	17
19	Tripod	2	-	-	2	2	2	2	2	2
20	Sound System Outdor	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kompor Gas	0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Server Blade center S PC 1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
23	Server Blade center S PC 2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
24	Server Blade center S PC 3	1	-	-	1	1	1	1	1	1
25	Server Blade center S PC 4	1	-	-	1	1	1	1	1	1
26	Server Blade center S PC 5	1	-	-	1	1	1	1	1	1
27	Server Blade center S PC 6	1	-	-	1	1	1	1	1	1
28	Server Blade center H PC 1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
29	Server Blade center H PC 2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
30	Server Blade center H PC 3	1	-	-	1	1	1	1	1	1
31	Server Blade center H PC 4	1	-	-	1	1	1	1	1	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH KONDISI SAAT INI			JUMLAH RENCANA PEMELIHARAAN					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
32	Xen Server DNS	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	Rack 42u1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
34	Rack 42u2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
35	Rack 42u3	1	-	-	1	1	1	1	1	1
36	Rack 42u4	1	-	-	1	1	1	1	1	1
37	Rack 30u	1	-	-	1	1	1	1	1	1
38	UPS arakawa	1	-	-	1	1	1	1	1	1
39	UPS Emerson	1	-	-	1	1	1	1	1	1
40	KVM Oxca	1	-	-	1	1	1	1	1	1
41	Storawagelbm	1	-	-	1	1	1	1	1	1
42	Fiber Optik	1	-	-	1	1	1	1	1	1
43	WifiPublik	1	-	-	1	1	1	1	1	1
44	Wireless	1	-	-	1	1	1	1	1	1
45	Pen Tab	-	-	-	-	-	1	-	1	1
46	Kamera	3	1	-	3	3	3	3	3	3
47	Drone	3	-	2	3	3	3	3	3	3
48	Jammer	2	-	-	2	2	2	2	2	2
49	Metal Detector	2	-	-	2	2	2	2	2	2
50	Bug detector	1	-	-	1	1	1	1	1	1
51	Radio HT	14	-	-	14	14	14	14	14	14
52	Firewall (Software)	1	-	-	1	1	1	1	1	1
53	Anti Virus (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Operation System Windows (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Microsoft Office (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Hard Disk External	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Televisi	2	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Sofa (full set)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
59	Camera Handycam	2	-	-	1	-	-	1	-	-
60	Lensa	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Drone DJI Phantom	-	-	1	-	-	-	-	-	-
62	Tripod	3	-	-	3	3	3	3	3	3
63	Clip on Wireless	4	-	-	4	4	4	4	4	4
65	Video Sender	1	-	-	1	1	1	1	1	1
66	LampuAputure	1	-	-	1	1	1	1	1	1
67	Camera Canon 70D	1	-	-	1	1	1	1	1	1
68	Camera DSLR	3	-	-	3	3	3	3	3	3
69	Drone Mavic Pro	1	-	-	1	1	1	1	1	1
70	I Mac	3	-	-	3	3	3	3	3	3
71	Vmix Live	1	-	-	1	1	1	1	1	1
72	Camcorder	3	-	-	3	3	3	3	3	3
73	High chair	2	-	-	2	2	2	2	2	2
74	Lisensi Sistem OPr. Windows	1	-	-	1	1	1	1	1	1
75	Lisensi Anti Virus	1	-	-	1	1	1	1	1	1
76	Lisensi SSL	1	-	-	1	1	1	1	1	1
77	Lisensi Firewall	1	-	-	1	1	1	1	1	1
78	CCTV (Paket)	31	-	16	31	31	31	31	31	31
79	Grounding (1 Paket)	1	-	-	1	1	1	1	1	1

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

Tabel 2.9
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH KONDISI SAAT INI			JUMLAH RENCANA PENGADAAN					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
	PENGADAAN BARANG									
1	Gedung Untuk Kantor Baru	1	-	-	-	1	-	-	-	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH KONDISI SAAT INI			JUMLAH RENCANA PENGADAAN					Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
2	Mobil	6	-	-	-	1	1	1	1	4
3	Sepeda Motor	8	-	-	-	1	1	1	1	4
4	Penghancur Kertas	1	1	-	1	1	1	1	1	5
5	Meja	51	4	11	12	13	10	7	6	48
6	Kursi Sandaran Sedang	61	1	16		12	10	7	6	35
7	Penghancur Kertas	1	1	-		1	-	-	-	1
8	Lemari Besi	3	-	-		3	3	3	2	8
9	Filling Kabinet	5	-	-	9	10	10	10	10	49
10	Rak Arsip Besi	0	-	-		4	4	2	1	11
11	AC	18	-	2	3	4	3	2	2	14
12	Lemari Pendingin / Kulkas	3	-	-	-	1	-	1	-	2
13	Dispenser	3	-	1	2	1	1	2	2	8
14	Lemari Kayu	12	-	1	-	3	2	2	2	9
15	Kursi Hadap	10	-	-	-	8	4	4	4	20
16	Personal Komputer	52	2	7	8	10	6	13	6	43
17	Laptop	11	1	1	4	12	7	5	3	31
18	Printer Scanner	17	-	1	1	15	13	16	12	57
19	Tripod	2	-	-	-	2	-	-	-	2
20	Sound System Outdoor	0	-	-	-	1	-	1	-	2
21	Kompor Gas	0	-	-	-	1	-	1	-	2
22	Server Blade center S PC 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Server Blade center S PC 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Server Blade center S PC 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Server Blade center S PC 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Server Blade center S PC 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Server Blade center S PC 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Server Blade center H PC 1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
29	Server Blade center H PC 2	1	-	-	-	1	-	-	-	1
30	Server Blade center H PC 3	1	-	-	-	-	1	-	-	1
31	Server Blade center H PC 4	1	-	-	-	-	-	1	-	1
32	Xen Server DNS	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	Rack 42u1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
34	Rack 42u2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
35	Rack 42u3	1	-	-	-	-	-	1	-	1
36	Rack 42u4	1	-	-	-	-	-	-	1	1
37	Rack 30u	1	-	-	-	1	-	-	-	1
38	UPS ara kawa	1	-	-	-	-	-	-	-	-
39	UPS Emerson	1	-	-	-	1	1	-	1	3
40	KVM Oxca	1	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Storawage lbm	1	-	-	1	1	1	-	-	3
42	Fiber Optik	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Wifi Publik	1	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Wireless	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Pen Tab	-	-	-	-	1	-	1	1	3
46	Kamera	3	1	-	-	2	-	4	3	9
47	Drone	3	-	2	-	2	-	2	-	4
48	Jammer	2	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Metal Detector	2	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Bug detector	1	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Radio HT	14	-	-	-	4	-	4	-	8
52	Firewall (Software)	1	-	-	-	1	1	1	1	4
53	Anti Virus (Software)	-	-	-	-	1	1	1	1	4
54	Operation System	-	-	-	-	1	1	1	1	4

NO	NAMA BARANG	JUMLAH KONDISI SAAT INI			JUMLAH RENCANA PENGADAAN					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
	Windows (Software)									
55	Microsoft Office (Software)	-	-	-	-	1	1	1	1	4
56	Hard Disk External	-	-	-	-	5	5	1	5	16
57	Televisi	2	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Sofa (full set)	-	-	-	1	-	-	-	-	1
59	Camera Handycam	2	-	-	1	-	-	1	-	1
60	Lensa	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Drone DJI Phantom	-	-	1	-	1	-	-	-	1
62	Tripod	3	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Clip on Wireless	4	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Video Sender	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Lampu Aputure	1	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Camera Canon 70D	1	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Camera DSLR	3	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Drone Mavic Pro	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Imac	3	-	-	-	1	-	-	-	-
71	Vmix Live	1	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Camcorder	3	-	-	-	-	-	-	-	-
73	High chair	2	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Karpet	1	-	-	2					2
75	Audio Mixer	1	-	-	1					1
76	Proyektor	1	-	-	1	1	1	1	1	5
77	Multy Interaktif Sistem	1	-	-	1					1

Sumber : Diskominfo Tahun 2019

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat capaian kinerja periode sebelumnya

Tingkat capaian kinerja Diskominfo berdasarkan sasaran/target Renstra Diskominfo periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.9, adapun realisasi pendanaan pelayanan Diskominfo Kota Bogor selengkapnya pada Tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Indikator Kinerja Sesuai Sasaran/Target Renstra	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	-	-	-	20	5	5	36	40	20	5	5	10	5	100%	100%	100%	27,8%	13%
2	Prosentase Sistem Informasi Manajemen yang telah terintegrasi lintas PD (%)	-	-	-	3,88	12,6	15,53	18,45	20,39	3,88	12,6	15,53	18,45	20,39	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	-	-	-	60	70	80	90	100	90,70	90,9	87,80	90,20	100	151%	129,9%	109,8%	100%	100%
4	Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (orang/PD)	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.10, terlihat bahwa hasil pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika rasio capaiannya hampir semua sebesar 100%, dihitung dari perbandingan antara target renstra dan realisasi capaian.

Pada indikator kinerja Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik, realisasi capaian melebihi target yaitu : pada tahun 2015 target kinerja 60% sedangkan realisasi capaian kinerja 90,7% dengan rasio capaian 151%; pada tahun 2016 target kinerja 70% sedangkan realisasi capaian kinerja 90,9% dengan rasio capaian 129%; pada tahun 2017 target kinerja 80% sedangkan realisasi capaian kinerja 87,8% dengan rasio capaian 109% dan pada tahun 2018 target kinerja 90% sedangkan realisasi capaian kinerja 90,2% dengan rasio capaian 100,2%.

Namun pada indikator jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi), realisasi capaian tidak mencapai target yaitu pada tahun 2018, target kinerja 36 lokasi sedangkan realisasi capaian kinerja 10 lokasi dengan rasio capaian sebesar 28%; dan pada tahun 2019 target kinerja 40 lokasi sedangkan realisasi capaian kinerja 5 lokasi dengan rasio capaian sebesar 13%.

Ketidak tercapaian target disebabkan karena dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan selalu adanya hambatan dan kendala. Dibawah ini beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam mencapai target indikator sasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9 antara lain:

1. Perencanaan yang disusun masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
2. Prasarana dan sarana yang kurang memadai;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur;
4. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan;

5. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan baik.

Permasalahan timbul akibat tidak sesuainya rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya pemecahan terhadap hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Pemenuhan terhadap prasara dan sarana penunjang;
2. Peningkatan kualitas aparatur misalnya antara lain melalui diklat, pelatihan, tugas belajar;
3. Dalam penganggaran untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan perencanaan;
4. Adanya Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan baik.

Tabel 2.11
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	470,000,000	423,000,000	380,000,000	247,120,000	1,013,502,579	344,166,588	381,701,528	354,674,577	236,951,334	336,152,709	73.23	90.24	93.34	95.89	33.17	1.387	0.531
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	998,000,000	1,556,800,000	950,351,000	1,000,000,000	409,303,000	932,817,203	1,371,541,589	929,579,241	882,899,108	286,040,100	93.47	88.10	97.81	88.29	69.88	0.408	0.605
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35,000,000	47,300,000	47,500,000	45,800,000	14,000,000	31,782,500	35,212,500	44,018,000	45,313,000	6,023,600	90.81	74.45	92.67	98.94	43.03	0.406	0.130
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11,013,585,900	11,980,334,100	9,996,658,000	9,959,250,800	8,350,605,010	10,095,414,553	11,665,110,483	9,726,642,747	9,550,111,195	4,533,928,664	91.66	97.37	97.30	95.89	54.29	0.441	0.611
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	237,500,000	217,500,000	21,229,000	-	-	224,583,500	210,210,600	21,229,000	-	-	94.56	96.65	100	0.507	0.518

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

Untuk rasio anggaran dan realisasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10, pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 dapat dikatakan baik karena rasio diatas 90% yaitu sebesar 95,14% pada tahun 2017 dan 95,13% pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 rasio anggaran dan realisasi dikatakan kurang baik dikarenakan belum mencapai hasil yang maksimal yaitu sebesar diatas 90%, hal ini dikarenakan program pelaksanaan dari kegiatan tersebut belum maksimal sehingga perlu evaluasi lebih lanjut. Adapun pada tahun 2019 sampai dengan bulan November rasio sudah mencapai 85,16%.

2.3.2. Tingkat capaian kinerja Transisi sebelum Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

Tingkat capaian kinerja Diskominfo berdasarkan sasaran/target Renstra Diskominfo pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang merupakan transisi pada Perubahan Renstra dapat dilihat pada tabel 2.12, tabel 2.13 dan tabel 2.14 sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Diskominfostandi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90%	90%	100%	885.502.579	864.661.028	98%
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Pemenuhan kebutuhan operasional Dinas	100%	100%	100%	885.502.579	864.661.028	98%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90%	90%	100%	409.303.000	404.247.999	99%
		Pengadaan Inventaris Kantor	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	335.950.000	333.754.848	99%
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	73.353.000	70.493.151	96%
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	75,10	89%	14.000.000	14.000.000	100%
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	14.000.000	14.000.000	100%
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informas	60%	50%	83%	8.540.205.010	8.436.086.732	99%
		Pengadaan BANDWIDTH.	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor	400 Mbps	400 Mbps	100%	2.500.000.000	2.499.990.000	100%
		Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone)	145 titik	145 titik	100%	669.936.800	666.657.800	100%
			Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor	145 titik	145 titik	100%			
		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	5 titik FO	5 titik FO	100%	772.327.400	766.861.650	99%
		Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Tersediannya wifi di ruang publik	45 titik	45 titik	100%	74.349.750	73.640.000	99%
Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	Terpeliharanya grounding listrik dan erester OPD dan kelurahan	4 titik	4 titik	100%	74.425.000	73.662.000	99%		

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Pengembangan dan Pengelolaan eGovernment	Jumlah aplikasi yang dibuat dan dikelola	3 aplikasi	3 aplikasi	100%	795.250.000	775.790.000	98%	
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Programmer	3 Orang	3 Orang	100%				
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Surveyor	3 Orang	3 Orang	100%				
		Tersedianya Tenaga Outsourcing Designer grafis	3 Orang	3 Orang	100%				
		Tersedianya webmail Kota Bogor	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%				
		Tersedianya Colocation Cloud	1 Paket	1 Paket	100%				
	Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	48.493.000	48.493.000	100%	
		Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor	5.322.488 Kunjungan	5.322.488 Kunjungan	100%				
	Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room	1paket	1paket	100%	297.144.000	294.370.000	99%	
		Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room	4 Orang	4 Orang	100%				
	Digitalisasi Profil	Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi	1 paket	-	-	29.551.350	29.030.000	98%	
		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Mesin Anjungan	1 paket	1 paket	100%				
	Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan	Terpenuhinya/Tercapainya Kebutuhan Informasi Bagi Publik Melalui Media Streaming Radio Sipatahunan	70%	-	-	95.717.000	95.711.000	100%	
		Terselenggaranya Streaming Radio Sipatahunan	5760 Jam	5760 Jam	100%				
		Operasional Streaming Radio Sipatahunan	12 Bulan	12 Bulan	100%				
		Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Radio Sipatahunan	1 Paket	1 Paket	100%				
		Peliputan/Penyiaran dan Operatoring Radio Sipatahunan	80 Kali	80 Kali	100%				
	Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan	Terpenuhinya/Tercapainya Kebutuhan Informasi Bagi Publik Melalui Media Streaming Televisi Sipatahunan	70%	-	-	153.617.000	152.018.000	99%	
		Terselenggaranya Streaming Televisi	5760 Jam	5760 Jam	100%				

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Sipatahunan						
			Operasional Streaming Televisi Sipatahunan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
			Peliputan/ Penyiaran/ Operatoring/ Editing Siaran TV dan Streaming TV Sipatahunan	80 Kali	80 Kali	100%			
			Tersedianya dan Terpeliharanya Alat-Alat Studio Televisi Sipatahunan	2 Paket	2 Paket	100%			
			Pembuatan Konten	1 Paket	1 Paket	100%			
			Peliputan/ Kameramen/ Editing	36 Kali	36 Kali	100%			
		Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik	Meningkatnya layanan Organisasi Perangkat Daerah berbasis Elektronik	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%	11.660.000	10.710.000	92%
		Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity	Terciptanya Ekosistem TIK untuk menunjang Smart City Kota Bogor	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%	38.600.000	22.350.000	58%
		Pengadaan Infrastruktur Data Center	Tersedianya perangkat Pusat Data	2 paket	2 paket	100%	295.782.000	291.270.000	98%
		Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center	Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Data	3 paket	3 paket	100%	381.170.450	378.094.000	99%
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA	1 paket	1 paket	100%	50.540.000	50.240.000	99%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	2 paket	2 paket	100%	69.995.000	68.690.000	98%
		Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat	Terkelolanya Layanan Contact Center pengaduan Masyarakat	80%	100%	125%	1.322.800.000	1.298.654.982	98%
		Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik	Tersedianya Booklet smartcity sebagai media penyebaran informasi	1 paket	1 paket	100%	47.200.000	45.550.000	97%
		Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	35.450.000	34.995.000	99%
		Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Tersedianya sistem keamanan informasi	3 paket	-	-	136.608.000	134.538.000	98%
			Terpeliharanya sistem informasi	30%	30%	100%			
			Terkelolanya komunikasi persandian	100%	100%	100%			
			Tersedianya alat keamanan informasi	1 Paket	1 Paket	100%			

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kinerja			Pendanaan		
				Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Tersedianya sistem keamanan informasi	2 Paket	2 Paket	100%			
			Tersedianya Anti Virus	1 Paket	1 Paket	100%			
		Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)	Tersusunnya Regulasi TIK	3 Dokumen	-	-	1.429.550	-	0%
		Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor	Terpelihara dan Tersedianya CCTV di lingkungan Balai kota dan Kawasan Publik	13 titik	13 titik	100%	353.273.510	347.275.000	98%
		Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota	75 kelompok	48 Kelompok	64%	63.417.000	63.062.600	99%
		Pembangunan Wifi ruang publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	5 titik	5 titik	100%	59.262.000	58.900.000	99%
		Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	1 paket	1 paket	100%	88.200.000	85.527.500	97%
		Penilaian Index E-Government Indonesia	Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE	3,13 index	3,10 Index	99%	33.588.200	29.838.200	89%
		Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse	Tersedianya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	1 paket	1 paket	100%	36.040.000	35.790.000	99%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektoral	5 kali	5 kali	100%	4.378.000	4.378.000	100%
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	2	100%	21.229.000	21.229.000	100%
		Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD	50 orang	50 orang	100%	8.829.000	8.829.000	100%
		Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	100 orang	100 orang	100%	12.400.000	12.400.000	100%
			JUMLAH				9.870.239.589	9.740.224.759	99%

Tabel 2.13

Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika								
1	Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Hasil Penilaian SPBE	2,92 indeks	2,97 Indeks	102%	7.947.168.000	7.793.249.600	98%
		Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	14%	14%	100%	2.284.015.000	2.204.192.200	97%
		Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85%	78%	92%	808.460.000	756.392.239	94%
		Persentase Keterbukaan Informasi publik	100%	98%	98%	670.097.600	663.865.100	99%
1	Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE	Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,92 Indeks	2,97 Indeks	102%	-	-	-
		Hak Akses terhadap 103 Aplikasi dan akan terus bertambah setiap tahunnya	2 Hak akses	-	-	-	-	-
2	Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya keberlangsungan pengelolaan website Kota Bogor (colocation)	12 Bulan	12 Bulan	100%	49.730.000	49.123.000	99%
		Tersedianya outsourcing pengelolaan website Kota Bogor	1 Orang	1 Orang	100%			
		Terpeliharanya keberlangsungan server domain Kota Bogor	1 Paket	-	-			
3	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE	2 Perwali	1 Perwali	100%	3.650.000	3.650.000	100%
4	Relokasi dan revitalisasi ruang kendali jaringan dan server	Tersedianya ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	3 Paket	1 Paket	33%	460.000.000	350.269.000	76%
		Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	1 Paket	100%			
6	Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	Terpeliharanya Perangkat ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	-	-	211.117.000	210.836.000	100%
		Tersedianya outsourcing ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tertata dan terkelolanya ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	-	-			
		Tersedianya DED Ruang Kendali Jaringan	1 Paket	1 Paket	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		dan Server						
7	Pengelolaan Data Recovery Center (DRC)	Tersedianya DRC	1 Paket	1 Paket	100%	156.937.000	148.972.000	95%
		Terpeliharanya perangkat data recovery center (DRC)	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya perangkat server	1 Paket	-	-			
8	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan FO di Perangkat Daerah	10 titik	9 Titik	90%	1.443.200.000	1.433.682.700	99%
9	Pembangunan Wifi Ruang Publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	10 titik	5 titik	50%	75.000.000	73.997.500	99%
10	Pemeliharaan Jaringan intranet dan internet (backbone) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se - Kota Bogor	146 titik	146 titik	100%	935.710.000	930.973.500	99%
11	Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Terpeliharanya wifi ruang publik	50 titik	50 titik	100%	49.968.000	48.743.000	98%
12	Pemeliharaan Grounding listrik dan erester	Terpeliharanya Grounding listrik dan erester Perangkat Daerah dan Kelurahan	8 titik	4 titik	50%	49.968.000	48.776.000	98%
13	Pengelolaan Bandwith	Tersedianya bandwith internet se - Kota Bogor	1000 Mbps	650 Mbps	65%	3.029.710.000	3.029.030.000	100%
14	Pengadaan CCTV Kota Bogor	Jumlah titik CCTV	15 titik	4 titik	27%	350.000.000	348.285.200	100%
15	Pemeliharaan CCTV Kota Bogor	Jumlah titik CCTV	58 titik	58 titik	100%	157.210.000	156.569.700	100%
		Tersedianya Outsourcing Operator CCTV	1 orang	1 orang	100%			
16	Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor	Terpeliharanya perangkat teleconference	1 Paket	1 Paket	100%	74.968.000	74.818.000	100%
		Tersedianya perangkat teleconference	1 Paket	-	-			
		Tersedianya lisensi ID Teleconference	1 Paket	-	-			
17	Pengembangan dan pengelolaan Bogor Green Room dan Command Center, Server Data dan Aplikasi	Terpeliharanya Perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center	1 Paket	1 Paket	100%	1.537.100.000	1.480.596.200	96%
		Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terbangunnya dan Meningkatnya Fasilitas Command Center	2 lokasi	2 lokasi	100%			
		Tersedianya PC dan Speaker aktif penunjang VideoWall	1 Paket	1 Paket	100%			
18	Pemindahan dan penataan ulang infrastruktur Command Center (Bogor Green Room) (APBD Provinsi)	Tersedianya command center yang memenuhi standar minimal sebagai Command Center, Monitoring center, dan	4 Paket	-	-	-	-	-

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Crisis Center						
19	Digitalisasi Profil dan Pengembangan/ promosi ekosistem e-government dan smart city	Tersedianya reklame untuk promosi smart city	1 paket	-	-	-	-	-
		Tersedianya master plan smart city	1 Dokumen	-	-			
		Tersedianya master plan e-government	1 Dokumen	-	-			
		Tersedianya anjungan promosi	7 Set	-	-			
20	Pengembangan datawarehouse dan sistem informasi kota (SIMATA)	Tersedianya Paket Pengembangan Datawarehouse	1 paket	-	-	-	-	-
21	Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi	Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	2 pertemuan	1 pertemuan	50%	17.075.000	17.075.000	100%
22	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	729.840.000	706.521.000	97%
		Tersedianya Outsourcing Programer pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing desainer pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing surveyor pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel	1 Paket	-	-			
		Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor	1 Paket	-	-			
23	Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi	Tersedianya Konten Publikasi Informasi	10 Konten	-	-	97.417.600	97.417.600	100%
		Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kreatif dan Inovatif	75 kelompok	-	-			
		Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat	1 Lomba	-	-			
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	11 Orang	11 Orang	100%			
		Tersebaranya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	4 Medsos (Internal & External)	4 Medsos (Internal & External)	100%			
		Tersedianya Peralatan studio Video dan	1 paket	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Film						
		Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	120 Buah	-	-			
24	Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia	Tersedianya Booklet Smartcity	1 paket	1 paket	100%	172.680.000	167.065.000	97%
		Terpeliharanya hologram	1 paket	-	-			
		Tersedianya Brosur/Leaflet	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya APK Mobily Smartcity	1 paket	-	-			
		Terkelolanya website dan media sosial	1 paket	1 paket	100%			
		Lomba Karya Jurnalis	1 Kali	1 Kali	100%			
25	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	1 paket	100%	808.460.000	756.392.239	94%
		Tersedianya Operator pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat	14 Org	14 Org	100%			
		Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengaduan Masyarakat	1 paket	-	-			
		Tersedianya server Aplikasi layanan Pengaduan masyarakat	1 Unit	-	-			
		Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	-	-			
		Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra	1 paket	1 paket	100%			
26	Pembuatan aplikasi Mobile Bogor Destinasi (DID)	Tersedianya aplikasi mobile bogor destinasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	100.000.000	99.382.500	99%
27	Pengadaan Sarana IT Pendukung Recovery Pariwisata (Hibah Pariwisata)	Tersedianya Server	1 Paket	1 Paket	100%	900.000.000	885.524.000	98%
		Tersedianya Router	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Wifi Publik di Kawasan Pariwisata	4 lokasi	4 lokasi	100%			
28	Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Tentang Pariwisata Kota Bogor (Hibah Pariwisata)	Terkelolanya penerbitan Advertorial di media massa	2 Bulan	2 Bulan	100%	300.000.000	300.000.000	100%
		Terselenggaranya sosialisasi program pemukot Bogorterkait pariwisata Kota Bogor di Media Massa	2 Bulan	2 Bulan	100%			
		Tersampaiannya informasi tentang kebijakan pemulihan pariwisata kota bogor	2 Bulan	2 Bulan	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		melalui jumpa pers						
II	Program : Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55%	85%	155%	2.560.000	2.560.000	100%
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID	Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu	40Lembaga	-	-	-	-	-
		Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	1 Dokumen	-	-			
		Workshop KIP	1 Kali	-	-			
2	Penguatan Hubungan Kelembagaan Masyarakat	Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor	1 Kali	-	-	2.560.000	2.560.000	100%
		Forum Perhumas	1 Kali	-	-			
		Keikutsertaan dalam Bakohumas TK. Provinsi dan TK. Nasional	2 Kali	-	-			
III	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	743.412.740	737.078.635	99%
1	Pengelolaan Rumah Tangga PD	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	743.412.740	737.078.635	99%
IV	Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80%	80%	100%	1.999.181.125	1.856.210.378	93%
1	Pengadaan Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	80%	80%	100%	1.702.764.125	1.563.424.250	92%
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	80%	80%	100%	296.417.000	292.786.128	99%
V	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B Point	BB Point	-	3.200.000	3.200.000	100%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3.200.000	3.200.000	100%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik								
VI	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	70%	70%	100%	273.529.000	272.446.500	100%
1	Pengelolaan Statistik Sektoral	Tersedianya indikator statistik sektoral	7 Indikator	-	-	127.607.000	127.607.000	100%
		Tersusunnya Data Indeks Ketahanan Keluarga	1 Paket	1 Paket	100%			
2	Satu Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya satu Data Statistik Sektoral	1 data statistik	-	-	68.179.000	67.996.500	100%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja			Pendanaan		
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			sektoral					
		Terpeliharanya Aplikasi Portal Data	1 Paket	1 Paket	100%			
3	Penyajian Statistik Sektoral	Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	2 media	1 Paket	50%	77.743.000	76.843.000	99%
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian								
VII	program : Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	Level 1	100%	89.065.000	88.782.000	100%
1	Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Tersedianya Dokumen Sistem Keamanan Informasi	1 Paket	-	-	89.065.000	88.782.000	100%
		Tersedianya Sistem Anti Virus	1 Paket	-	-			
		Tersosialisasinya Keamanan Informasi	164 Orang	-	-			
		Tersedianya Firewall	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Software berlisensi	1 Paket	-	-			
		Tersedianya SSL	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Pada E surat Diskominfo	1 Paket	1 Paket	100%			
2	Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Audit Sistem Elektronik per tahun dengan pertimbangan bahwa setiap tahunnya akan ada penambahan dan pengembangan aplikasi	1 Paket	-	-	-	-	-
		JUMLAH				14.820.688.465	14.377.976.652	97%

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika								
I	Program : Aplikasi Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,71 Indeks	3,10 Indeks	114%	65.930.000	60.109.800	91%
		Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	3,0 Indeks	2,50 Indeks	83%	24.255.000	22.170.000	91%
		Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,33 Indeks	3,25 Indeks	139%	6.162.728.470	5.926.870.120	96%
		Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	2,7 Indeks	2,63 Indeks	97%	577.811.400	571.417.750	99%
1	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	100%	100%	100%	49.730.000	49.365.800	99%
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	100%	94%	94%	4.718.081.200	4.707.315.720	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	level 4	-			
		Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	level 3	level 4	-			
	Sub Kegiatan : Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Persentase Domain dan Subdomain yang terkelola	100%	-	-	49.730.000	49.365.800	99%
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan IP address versi 6 (Ipv6)	1 Perangkat Daerah	-	-			
		Tersedianya Colocation Server Domain dan Sub Domain Kota Bogor	1 Tahun	1 Tahun	100%			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	10 titik	4 titik	40%	4.718.081.200	4.707.315.720	100%
		Jumlah Titik Wifi Publik	5 titik	-	-			
		Jumlah Titik Jaringan Intranet dan Internet pada Perangkat Daerah se Kota Bogor yang dipelihara	146 titik	146 titik	100%			
		Jumlah Wifi Publik yang dipelihara	5 titik	-	-			
		Jumlah grounding listrik dan erester	7 titik	7 titik	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		yang dipelihara						
		Jumlah Kapasitas Bandwidth Internet di Kota Bogor	1100 Mbps	1100 Mbps	100%			
		Tersedianya perangkat LAN	2 Paket	2 Paket	100%			
		Tersedianya Perangkat FO	2 Paket	2 Paket	100%			
		Tersedianya Perangkat Wireless	2 Paket	2 Paket	100%			
		Terlaksananya perencanaan teknis jaringan FO	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terlaksananya pengawasan teknis jaringan FO	1 Paket	1 Paket	100%			
2	Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	level 3	Level 5	-	24.255.000	22.170.000	91%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah						
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 4	-	65.930.000	60.109.800	91%
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	level 3	Level 5	-			
		Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	level 3	Level 4	-			
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	level 3	level 3	-	314.557.600	314.037.300	100%
		Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%	515.592.300	511.687.750	99%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	level 3	Level 4	-	190.702.500	190.635.200	100%
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	level 3	Level 5	-	850.182.260	626.072.400	74%
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 2	Level 3	-	39.474.910	39.443.700	100%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	level 3	Level 4	-	62.219.100	59.730.000	96%
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	level 3	Level 4	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah regulasi eGovernment yang terbit	2 Dokumen	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	Jumlah peserta Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun Tersedianya Sertifikasi ISO	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100%	65.930.000	60.109.800	91%
			-	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Elektronik							
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya DRC	1 Paket	-	-	314.557.600	314.037.300	100%
		Terkelolanya Perangkat Pusat Data	7 Paket	-	-			
		Terkelolanya Perangkat Pusat Data	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Data Recovery Center	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Router	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terpeliharanya perangkat teleconference	1 Paket	1 Paket	100%	74.968.000	74.924.000	100%
		Tersedianya perangkat teleconference	1 Paket	-	-			
		Tersedianya lisensi ID Teleconference	1 Paket	-	-			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah pengadaan titik CCTV	10 titik	-	-	115.734.500	115.711.200	100%
		Jumlah titik CCTV yang dipelihara	20 titik	69 Titik	342%			
	Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi Layanan e-Government yang dibangun/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	850.182.260	626.072.400	74%
		Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi	-	-	-			
		Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel	1 Paket	1 Tahun	100%			
		Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor	1 Paket	1 Tahun	100%			
		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	-	-	-			
		Tersedianya Sewa Layanan Colocation Server Webmail Kota Bogor	1 Tahun	1 Tahun	100%			
		Tersedianya Layanan Cloud Simral Kota Bogor	-	-	-			
		Tersedianya Pendampingan SIMRAL	-	-	-			
		Tersedianya Aplikasi Dashboard khusus covid	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
		Tersedianya Memory Server	5 unit	5 unit	100%			
		Tersedianya Harddisk Server	2 Unit	2 Unit	100%			
		Tersedianya Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	-	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Daerah - Kota Bogor						
		Tersedianya Perangkat Pendukung Pengembangan Aplikasi	1 Unit	1 Unit	100%			
		Tersedianya Workshop Integrasi	1 Pertemuan	1 Pertemuan	100%			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terpeliharanya Server Datawarehouse	1 Paket	1 Paket	100%	39.474.910	39.443.700	100%
		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemerintah	1 Paket	-	-			
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terpeliharanya anjungan untuk promosi	-	-	-	62.219.100	59.730.000	96%
		Tersedianya Sarana Komunikasi Digital	1 Paket	1 Paket	100%			
		Terselenggaranya FGD Smart City dan Sosialisasi Smart City	-	-	-			
		Terselenggaranya Pameran Smart City	-	-	-			
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center	1 Paket	1 Paket	100%	515.592.300	511.687.750	99%
		Terbangunnya dan Meningkatnya Fasilitas Command Center	-	-	-			
		Tersedianya peralatan personal komputer	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	laporan monev penilaian mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97 Indeks	3,11 Indeks	105%	24.255.000	22.170.000	91%
II	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi publik	63%	77,5 %	123%	5.441.787.100	5.424.116.222	100%
3	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	85%	85%	100%	4.186.676.600	4.182.555.200	100%
		Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	65%	85%	131%	936.396.100	931.078.600	99%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85%	85%	100%	318.714.400	310.482.422	97%
		Persentase PPID PD yang aktif	85%	85%	100%			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Booklet Smart City	1 Paket	1 Paket	100%	936.396.100	931.078.600	99%
		Ketersediaan perangkat penunjang	1 Paket	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		pengelolaan komunikasi dan informasi publik						
		Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan(konten)	365 konten	-	-			
		Lomba Karya Jurnalis	1 Kegiatan	-	-			
		Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	2 Kegiatan	-	-			
		Jumlah Video	24 konten / tayangan	-	-			
		Konten Audio Visual di Multimedia dan Media Sosial	24 Tayangan	24 Tayangan	100%			
		Perangkat Penunjang Komunikasi Publik kegiatan Bakohumas	1 Paket 1 Kegiatan	1 Paket 1 Kegiatan	100% 100%			
		forum Perhumas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Hal Pelayanan Informasi Publik	36 Jumlah Perangkat Daerah	-	-	318.714.400	310.482.422	97%
		Tersusunnya Laporan PPID	40 Lembaga	-	-			
		Presentase terpeliharanya Aplikasi sibadra dan sarana penunjang	80%	-	-			
		Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub kegiatan: Layanan Hubungan Media	Jumlah penyebaran informasi melalui media TV untuk masyarakat Kota Bogor dan Radio	12 Konten	-	-	4.186.676.600	4.182.555.200	100%
		Jumlah Kerjasama dengan media	180 orang	-	-			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Jumlah penyebaran informasi melalui advetorial disurat kabar	4 Jenis media (online nasional, online lokal, cetak lokal, elektronik Tv dan radio)	-	-			
		Jumlah kegiatan diseminasi informasi melalui media massa	120 meter	-	-			
		Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%			
		Tersedianya Konten Publikasi	1 Konten	1 Konten	100%			
		Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan	1 Tahun	1 Tahun	100%			
		Tenaga konsultan analisis media masa	6 Orang	6 Orang	100%			
		Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	466 Meter	466 Meter	100%			
III	Program : penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB	A	-	13.020.000	13.020.000	100%
		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	85%	85%	100%	389.882.000	357.040.836	92%
		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	12.552.542.506	11.941.641.414	95%
4	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	13.020.000	13.020.000	100%
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	13.020.000	13.020.000	100%
5	kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%	9.427.877.562	8.893.705.817	94%
	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%	9.427.877.562	8.893.705.817	94%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
6	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	476.826.700	438.586.496	92%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	13.789.000	13.675.000	99%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%	254.969.300	239.488.400	94%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	20.818.400	20.746.600	100%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	187.250.000	164.676.496	88%
7	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	144.598.800	143.625.000	99%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	-	-	-	-	0%
	Sub Kegiatan : Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor lainnya	4 Paket	2 Paket	50%	144.598.800	143.625.000	99%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	-	-	-	-	-
8	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.503.239.444	2.465.724.101	99%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	100%	100%	100%	12.000.000	1.909.718	16%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 orang	4 orang	100%	2.491.239.444	2.463.814.383	99%
		Tersedianya Operator Pengelola Layanan	13 orang	13 orang	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Pengaduan Masyarakat						
		Tersedianya outsourcing Operator bogor green room	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing CCTV	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Jaringan Infrastruktur	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Pengelola Media Komunikasi Publik	8 orang	8 orang	100%			
		Tersedianya Outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Outsourcing Pusat Data	1 paket	1 paket	100%			
		Tersedianya Pengelola Portal Data	2 orang	2 orang	100%			
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	2 orang	2 orang	100%			
		Tersedianya jasa supir	2 orang	2 orang	100%			
		Hutang TA 2020	1 Paket	1 Paket	100%			
9	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	389.882.000	357.040.836	92%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Kendaraan	13 Kendaraan	100%	243.980.000	220.921.669	91%
		Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	1 Paket	1 Paket	100%	53.242.000	48.450.000	91%
		Tersedianya Pemeliharaan Komputer- Komputer	1 Paket	1 Paket	100%			
		Tersedianya suku cadang alat angkutan	1 Paket	1 Paket	100%			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan	2 Paket	-	-	92.660.000	87.669.167	95%
		Tersedianya Jasa Konsultansi Pengawas	2 Paket	-	-			
		Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2 Paket	3 Paket	100%			
		Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	1 Paket	1 Paket	100%			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik								
IV	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	76%	82%	108%	159.103.200	155.821.100	98%
		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	0,2%	0,4%	200%	81.130.000	80.882.331	100%
10	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	76%	82%	108%	43.049.200	40.059.200,00	93%
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	76%	82%	108%	81.130.000	80.882.331	100%
		Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	1 paket	1 paket	100%	116.054.000	115.761.900	100%
	Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral	Buku induk statistik sektoral	1 Paket	1 Paket	100%	81.130.000	80.882.331	100%
		Tersusunnya metadata statistik sektoral	1 Paket	1 Paket	100%			
	Sub Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur	Jumlah hardware dan software yang tersedia sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	1 paket	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/ Bintek/Workshop/ Seminar bagi SDM Perangkat daerah	100%	-	-	43.049.200	40.059.200,00	93%
		Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	1 Media	1 Media	100%			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi	Terselenggaranya satu data statistik sektoral	2 Paket	2 Paket	100%	116.054.000	115.761.900	100%

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kinerja			Pendanaan		%
			Target Renstra	Realisasi Capaian	%	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral							
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian								
V	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	Level 1	-	165.217.000	164.633.925	100%
11	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	80%	80%	100%	165.217.000	164.633.925	100%
		Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email kota bogor)	25%	25%	100%	-	-	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	presentase insiden keamanan informasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	165.217.000	164.633.925	100%
		Tersedianya Antivirus	12 Lisensi	12 Lisensi	100%			
		Tersedianya Firewall	1 Lisensi	1 Lisensi	100%			
		Tersedianya Sistem Operasi (Windows)	10 Lisensi	10 Lisensi	100%			
		Tersedianya Software (Microsoft Office)	5 Lisensi	5 Lisensi	100%			
		Tersedianya SSL	1 Lisensi	1 Lisensi	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yg sudah menerapkan tanda tangan digital/sertifikat elektronik	9 perangkat Daerah	-	-	-	-	-
		Jumlah aplikasi yg telah di deteksi kerentanan keamanan informasi	1 Aplikasi	-	-			
		Jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	150 Orang	-	-			
		JUMLAH				25.633.406.676	24.717.723.498	

2.3.3. Capaian inovasi

Pada periode sebelumnya, pada tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada saat itu bernama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membuat inovasi Fasilitas E-Govt Center (Help Desk IT Support Level Kota) dengan semula diberi nama Lab-Rice yang berfungsi sebagai Help Desk IT Support Level Kota yang terus berkembang hingga hari ini dengan nama baru yaitu E-Govt Center pada tahun 2019 di gedung Ex-DPRD Kota Bogor yang sekarang sudah berpindah ke gedung Diskominfo Balaikota Bogor lantai 2. Fasilitas E-Govt Center ini bertujuan untuk memudahkan OPD dalam konsultasi terkait implementasi aplikasi, sharing ilmu, penggunaan teknis aplikasi baik dari level end-user hingga level backend-programmer, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan OPD dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pada Tahun 2019 sampai dengan 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan inovasi sebanyak 14 inovasi, yang dilaksanakan oleh Bidang e-Government, Bidang Jaringan, Domain dan Persandian dan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Adapun keseluruhan inovasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Fasilitas E-Govt Center (Help Desk IT Support Level Kota)	2015	Dibangun pada tahun tahun 2015 dengan semula diberi nama Lab-Rice yang berfungsi sebagai Help Desk IT Support Level Kota yang terus berkembang hingga hari ini dengan nama baru yaitu E-Govt Center. Fasilitas E-Govt Center ini bertujuan untuk memudahkan OPD dalam konsultasi terkait implementasi aplikasi, sharing ilmu, penggunaan teknis aplikasi baik dari level end-user hingga level backend-programmer, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan OPD dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor

No	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
2	SiBADRA	2019	Aplikasi Pelayanan Aduan, Saran, dan Komunikasi Masyarakat Kota Bogor kepada Pemerintah Kota Bogor
3	Bogor Single Windows	2020	<p>Pengembangan Aplikasi Bogor Single Window adalah sebagai platform Layanan dan Informasi terpusat untuk masyarakat Kota Bogor dari pemanfaatan data yang telah masuk ke Data Warehouse Kota Bogor, dengan tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Publik Pemerintah Kota Bogor yang lebih baik, - Meningkatkan kultur dan budaya kerja, - Tersedianya pusat database dan framework Smart City Kota Bogor - Kemudahan sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah
4	DETEKTIF COVID	2020	Sebagai Media Komunikasi dan Informasi penanganan Covid-19 di Kota Bogor Sebagai DSS (Decision Support System) bagi Pemerintah untuk penentuan kebijakan penanganan Covid -19 seperti Level PPKM, serta menentukan Zona Wilayah per-kelurahan berdasarkan jumlah konfirmasi dan suspect Covid
5	APLIKASI JAGA ASA	2020	Mencegah data ganda penerima bantuan sosial dan antrian pembagian bantuan sosial
6	APLIKASI TATA NASKAH DINAS	2020	Transformasi pengelolaan surat dari konvensional menjadi digital
7	Smart Posyandu	2020	Transformasi Digital dari layanan administrasi Posyandu paper base menjadi digital base
8	Bansos Swadaya	2020	Bansos Swadaya adalah aplikasi digunakan untuk memberikan kemudahan bagi Tim Posko Gugus Tugas Covid-19, Dinas Sosial, BPBD, dan Kelurahan se-Kota Bogor dalam Pengelolaan Administrasi Bantuan Sosial Khusus Covid-19 di lingkungan Posko Gugus Tugas Covid-19
9	Data Ware House	2021	Menciptakan Big Data Kota Bogor untuk terciptanya preservasi data, integrasi dan interoperabilitas data.
10	BOGOR BERLARI	2021	Aplikasi Pendukung Pemulihan Ekonomi Kota Bogor (Bogor Berlari) sebagai platform Informasi dan produk UMKM Kota Bogor, dengan tujuan meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk UMKM Kota Bogor; tersedianya data UMKM Kota Bogor; dan sebagai media promosi produk UMKM Kota Bogor.
11	SIPEKA PPID (Sistem Informasi Pendukung Keputusan PPID)	2021	Bertujuan untuk memudahkan pengukuran kelengkapan administrasi PPID terhadap indikator yang telah ditetapkan pada tiap OPD dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik, sehingga monitoring dan evaluasi PPID pada tiap OPD jadi lebih mudah.
12	Tim Support Multimedia Tingkat Kota	2021	Tim kerja yang membantu menyediakan informasi dalam bentuk konten multimedia melalui website maupun media sosial
13	Podcast	2022	Radio sipatahunan sebagai radio daerah tidak dapat mengudara sebagaimana aturan yang berlaku. Untuk itu Diskominfo menggunakan Podcast sebagai media alternatif radio yang bertujuan untuk berbagi informasi dan media komunikasi

No	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
14	Cloud Virtuali Server	2022	Sehubungan dengan banyaknya jumlah pengembangan dan pembangunan aplikasi milik perangkat daerah yang harus dikelola oleh Pusat Data yang tidak sebanding dengan jumlah perangkat server yang dimiliki dan dalam rangka peningkatan teknologi pengelolaan server di pusat data maka dibutuhkan pengadaan server dengan spesifikasi memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu dengan menggunakan teknologi virtualisasi server
15	Tim Asesmen Standarisasi Aplikasi dan Domain	2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kemampuan interoperabilitas antar sistem informasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor; 2. Menggali lebih detail kebutuhan dasar (requirement) dasar dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; 3. Melakukan asesmen atas permohonan hosting dan sub-domain; 4. Menyusun pola atau kerangka dasar (framework) dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi; 5. Menetapkan pola pemetaan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; 6. Menetapkan standar acuan aplikasi dan sistem informasi; Melakukan sosialisasi yang intensif dan efektif perihal operabilitas dan standar acuan yang harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah guna terwujudnya interoperabilitas antar sistem informasi; 7. Menyusun bahan rekomendasi hasil asesmen;

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan/ *Strenght* (S)

- Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 17);

- Tersedianya beberapa peraturan Wali Kota Bogor dibidang Teknologi Informasi dan penyelenggaraan *e-Government*;
- Terintegrasinya layanan pengaduan non kedaruratan dan kedaruratan untuk mengatasi adanya kesenjangan layanan pengaduan masyarakat.

b. Kelemahan/ *weakness* (W)

- Gedung kantor dan perlengkapan kantor yang kurang representatif;
- Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur TIK;
- Keterbatasan dalam pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana TIK;
- Terbatasnya pegawai/aparatur yang berkompentensi dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian khususnya tenaga teknis dan ahli;
- Terbatasnya prasarana dan sarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
- Belum optimalnya pengamanan informasi dan persandian;
- Belum terintegrasinya semua Sistem Informasi dan Database Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya diseminasi informasi dan pengembangan aplikasi TIK.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kekuatan/ *Strenght* (S)

- Komitmen Pimpinan daerah;
- Perangkat Daerah sudah memiliki Sistem Informasi untuk data dan pelayanannya.

b. Kelemahan/ *weakness* (W)

- Sistem Informasi yang dibangun di Perangkat daerah masih ada beberapa yang belum sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.

Berdasarkan analisis terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dapat digambarkan bahwa terdapat tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor pada 5 (lima) tahun yang akan datang antara lain:

1. Peluang

- a. Adanya Buku Rencana Induk Pengembangan *e-Government* 2014-2018 dan hasil reviunya sebagai acuan dalam pembuatan *Masterplan e-Government* 2020;
- b. Reviu *Masterplan Bogor Smartcity* 2017-2021;
- c. Komitmen Kepala Daerah terhadap penerapan *e-Government* dan perwujudan *Smartcity* Kota Bogor;
- d. Komitmen kepala daerah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi Pemerintah Daerah;
- f. Regulasi Pemerintah Pusat tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- g. Bimbingan teknis aparatur tentang keamanan sistem informasi.

2. Tantangan

- a. Implementasi *Masterplan e-Government* dan *Masterplan Bogor Smartcity*;
- b. Peningkatan infrastruktur pengelolaan TIK;
- c. Integrasi data urusan pemerintahan daerah Kota Bogor;
- d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- e. Peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana untuk keamanan sistem informasi.

Untuk mengarasi tantangan pengembangan pelayanan perangkat daerah maka dilakukan hasil analisis terhadap renstra dinas komnfo profinsi jawa barat, hasil telaahan RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Hal ini menjadi acuan dalam perubahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yaitu Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024.

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan perubahan rencana strategis, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Tabel berikut menampilkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang dikelompokkan menurut pembagian urusan yang diselenggarakan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tidak tercapainya target nilai penyelenggaraan e- <i>Government</i>	Nilai dimensi kelembagaan dalam penilaian indeks e- <i>Government</i> Kota Bogor masih di bawah 3	Kurangnya SDM TIK yang kompeten
		Nilai dimensi infrastruktur dalam penilaian indeks e- <i>Government</i> Kota Bogor masih di bawah 3	Gedung kantor dan perlengkapan kantor yang kurang representatif dan Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar
		Kesenjangan layanan pengaduan masyarakat	Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil
			Penerimaan pengaduan non kedaruratan (call center) hanya berlaku di jam kerja dan hari kerja sedangkan layanan kedaruratan (NTPD) beroperasi selama 24 jam setiap hari selama setahun
2	Belum terselenggaranya Statistik Sektoral	Tusi masih tumpang tindih dengan perangkat daerah lain	Kurangnya SDM yang kompeten; Belum menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral
3	Adanya ancaman terhadap keamanan aset informasi	Terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi	Belum tersedianya regulasi yang mengatur keamanan informasi

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Wali Kota Bogor sebagai visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Kota Yang Ramah Keluarga mengandung makna:

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 maka ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat;
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas;
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera.

Berdasarkan rumusan misi Walikota Bogor dalam dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung keberhasilan Visi Wali Kota Bogor adalah sebagaimana dirumuskan dalam misi yang kedua yaitu **“Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”**.

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota.

Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Misi Kedua tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah **“Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart Government)”**.

Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah **“Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”** dan **“Meningkatnya kualitas** layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta **pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)”**.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Sasaran 1 : Tersedianya data statistik sektoral

Sasaran 2 : Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah

Tujuan 2 : Peningkatan kualitas smart government

Sasaran 1 : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan/Sasaran Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>)</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</p> <p>2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program yang dilaksanakan harus berkelanjutan (<i>suistanable</i>). - Banyaknya program <i>Smartcity</i> yang belum tersosialisasikan sampai ke tatanan masyarakat umum. - Perlunya pendidikan yang terkait dengan bidang TIK pada level sekolah (dini), seperti penggunaan internet secara cerdas dan peningkatan fungsi dari internet bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan nilai ekonomis dari usahanya. - Keterbatasan prasarana dan sarana serta SDM aparatur untuk melakukan pelayanan. - Kurangnya kualitas dari para ASN untuk bidang TIK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran untuk kegiatan <i>Smart Government</i> masih sangat kurang memadai hal ini menyulitkan inovasi-inovasi yang ingin dilakukan. - Masih kurangnya kontribusi pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuatnya komitmen dari Pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas. - Kuatnya partisipasi dari masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan di Kota Bogor.
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum stabilnya akses internet di semua Perangkat Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran terbatas untuk pemeliharaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala Daerah tentang pelayanan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan/Sasaran Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya server yang berada di luar data center Dinas Kominfo. 	<ul style="list-style-type: none"> - pemasangan baru akses internet. - Anggaran terbatas untuk membangun ruang server yang layak. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Smart Government.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pelayanan pengaduan belum maksimal. - Tindak lanjut pelayanan pengaduan perangkat daerah masih memerlukan waktu penyelesaian yang lama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alur Birokrasi yang panjang. - Kurangnya sosialisasi sarana layanan pengaduan kepada masyarakat. - Terbatasnya prasarana dan sarana. - SDM Verifikator kurang memahami tugas dan fungsinya. - Masyarakat yang selalu ingin pengaduannya cepat dilayani/ ditindaklanjuti. - Masih tumpang tindih pelaksanaan tugas kemitraan media dengan humas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana dan sarana layanan penanganan pengaduan masyarakat. - Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelayanan penanganan pengaduan masyarakat. - Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 486.45-234 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Kota Bogor. - SOP Penanganan Pengaduan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan/Sasaran Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			Masyarakat.
	Adanya ancaman terhadap keamanan sistem informasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memadai di bidang kemanan informasi. - Anggaran terbatas di bidang kemanan informasi 	Adanya antivirus, firewall, dan SOP tentang Keamanan Informasi.
	- Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral yang mendukung kebijakan satu data.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi untuk mendukung terlaksananya kebijakan satu data Kota Bogor. - Belum tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. - Belum tersedianya SDM analis statistik data dan pengolah data yang kompeten untuk membantu proses pelaksanaan statistik sektoral. 	Telah tersedia aplikasi yang dapat mendukung proses pelaksanaan kebijakan satu data seperti Portal Data, SIMATA dan Datawarehouse.

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kota Bogor yang mempengaruhi pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan.	Banyaknya program <i>Smartcity</i> yang belum tersosialisasikan sampai ke tatanan masyarakat umum.	Keterbatasan prasarana dan sarana, SDM aparatur TIK serta kesenjangan kemampuan pelaksanaan TIK di masyarakat.	Kuatnya komitmen dari Pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan sosial budaya, pertahanan dan keamanan	Penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur jaringan yang terus dilakukan di Kota Bogor. - Penyediaan akses internet publik telah tersedia pada area publik melalui pembangunan wifi publik.
Terselenggaranya tatakelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Penerapan kebijakan internal tatakelola komunikasi dan informatika belum optimal	Beberapa Kebijakan Internal terkait tatakelola komunikasi dan informatika masih dalam bentuk konsep dan belum dimasukkan kedalam kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen <i>Masterplan</i> TIK - Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Induk <i>e-Government</i> - Surat Keputusan Dewan

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		Peraturan Wali Kota	<i>Smartcity</i> tahun 2017 yang mendukung penerapan SPBE
Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	Pembangunan sistem yang terintegrasi dalam menerapkan <i>e-government</i>	Penggunaan aplikasi umum berbagi masih diterapkan di sebagian Perangkat Daerah	Komitmen Kepala Daerah tentang pelayanan <i>Smart Government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sumber : Renstra Kemenkominfo

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, disebutkan bahwa Tujuan penataan ruang wilayah Daerah Kota adalah mewujudkan ruang Daerah Kota sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai Kota Pusaka yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah dimaksud ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

1. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
3. kebijakan dan strategi pengembangankawasan strategis.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam Renstra telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni Langgan

broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya dan Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam menanggapi isu rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil reuiu terhadap:

1. Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
2. Analisa berbagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melalui proses identifikasi permasalahan menurut bidang dan pembagian urusan konkuren pemerintah daerah yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai berikut:
 - Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Kebijakan pengembangan Smartcity di Indonesia melalui program Gerakan Menuju 100 *Smartcity* Indonesia;
- Belum adanya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Urusan Kongruen Komunikasi dan Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Infrastruktur layanan konektivitas dan jaringan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Kota Cerdas sesuai dengan Standar Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Integrasi layanan pengaduan non-kedaruratan dan kedaruratan harus dilakukan untuk mengatasi adanya kesenjangan layanan pengaduan masyarakat;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan statistik serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, harus menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan persandian serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan wajib menyelenggarakan penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral
		Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)
		Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah
2	Peningkatan Kualitas <i>Smart Government</i>	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep <i>Good Governance</i>	Nilai Indeks Evaluasi SPBE
			IKM layanan pengaduan masyarakat

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

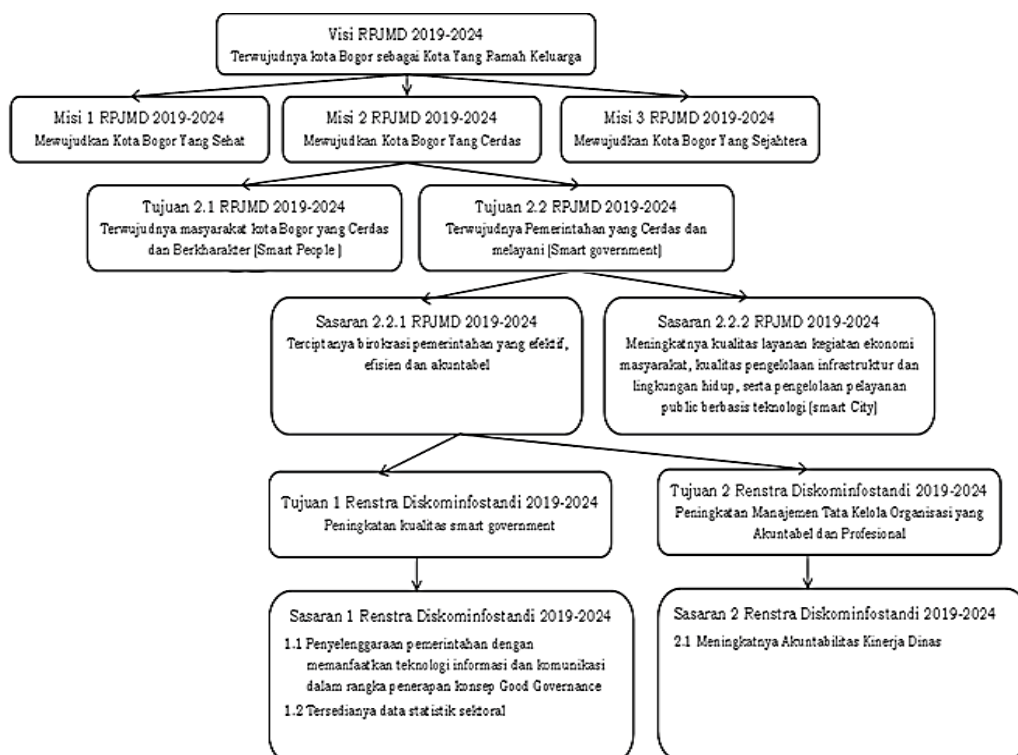
Tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, dapat di lihat pada Tabel 4.2. dibawah ini:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-			
				2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	76	79	82	85
		Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2
		Meningkatnya KualitasTatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	NA	80,01	81	82
2	Peningkatan Kualitas Smart Government	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	2.97	2.98	2.98	2.99
			IKM layanan pengaduan masyarakat	80	82	85	85

Sumber : Diskominfo Tahun 2022

Alur penetapan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI : Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data	Menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya sumber data dan informasi Statistik Sektoral
	Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi	Merumuskan regulasi yang mengatur tentang keamanan informasi.
	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
Peningkatan kualitas smart government	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep	Meningkatkan tata kelola kelembagaan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK.
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK.	Peningkatan prasarana dan sarana data center sesuai standar.

VISI : Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
	Good Governance		Penyediaan jaringan fiber optik di perangkat daerah.	
			Penetapan regulasi pengelolaan server.	
			Memenuhi Kebutuhan Server Back Up Data dan DRC.	
			Penyediaan dan Pemeliharaan CCTV.	
			Melaksanakan penataan dan pemeliharaan CCTV se-Kota Bogor.	
			Melaksanakan Layanan Telekonferensi Pemerintah.	
			Meningkatkan Layanan Interoperabilitas.	Menyelenggarakan Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi bagi Seluruh Perangkat Daerah dengan menetapkan standar format data dan aplikasi.
				Menyelenggarakan Layanan Application Programm Interface (API) daerah.
				Melaksanakan layanan epository/Dataaware house.
				Penetapan Regulasi tentang Hak Akses, Pengelolaan Data Base dan Datawarehouse.
				Meningkatkan jumlah sistem informasi yang di

VISI : Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			integrasikan.
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat berbasis elektronik dan media cetak.
		Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik	Integrasi layanan pengaduan non kedaruratan (call center) dengan layanan kedaruratan (NTPD) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangandengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Disamping adanya perubahan RPJMD Kota Bogor, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan ValidasiPemutakhiran Klasffikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaal Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan pendanaan indikatif ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Pemdadalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - e. Pengembangan Infrastruktur;
 - f. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
 - c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
 - d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
 - a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

4. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;

- c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- 2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
 - d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - f. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
 - g. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - h. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - i. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
 - j. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - k. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
 - l. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE;

5. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - c. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - f. Pelayanan Informasi Publik.
 - g. Layanan Hubungan Media;
 - h. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - i. Manajemen Komunikasi Krisis
 - j. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - k. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

1. Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif mengalami perubahan di tahun 2020, 2021 dan 2022. Sehingga mengalami transisi di tahun 2019, 2020 dan 2021. Adapaun secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.1, Tabel 6.2, Tabel 6.3 dan Tabel 6.4 berikut :

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2019

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Diskominfostandi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.013.502.579
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Pemenuhan kebutuhan operasional Dinas	100%	1.013.502.579
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	409.303.000
		Pengadaan Inventaris Kantor	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	335.950.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100%	73.353.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	14.000.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	14.000.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informas	60	8.350.605.010
		Pengadaan BANDWIDTH.	Tersedianya Bandwidth internet OPD Se-Kota Bogor	400 Mbps	2.500.000.000
		Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone)	145 titik	669.936.800
		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	5 titik FO	772.327.400
		Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Tersediannya wifi di ruang publik	45 titik	74.349.750

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	Terpeliharanya grounding listrik dan erester OPD dan kelurahan	4 titik	74.425.000
		Pengembangan dan Pengelolaan eGovernment	Jumlah aplikasi yang dibuat dan dikelola	3 aplikasi	605.650.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor	1 aplikasi	48.493.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room	1 paket	297.144.000
		Digitalisasi Profil	Terpeliharanya Mesin Anjungan Informasi	1 paket	29.551.350
		Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan	Terpenuhinya/Tercapainya Kebutuhan Informasi Bagi Publik Melalui Media Streaming Radio Sipatahunan	70,0%	95.717.000
		Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan	Terpenuhinya/Tercapainya Kebutuhan Informasi Bagi Publik Melalui Media Streaming Televisi Sipatahunan	70%	153.617.000
		Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik	Meningkatnya layanan Organisasi Perangkat Daerah berbasis Elektronik	30 Perangkat Daerah	11.660.000
		Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity	Terciptanya Ekosistem TIK untuk menunjang Smart City Kota Bogor	2 kegiatan	38.600.000
		Pengadaan Infrastruktur Data Center	Tersedianya perangkat Pusat Data	2 paket	295.782.000
		Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center	Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Data	3 paket	381.170.450
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA	1 paket	50.540.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	2 paket	69.995.000
		Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat	Terkelolanya Layanan Contact Center pengaduan Masyarakat	80%	1.322.800.000
		Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik	Tersedianya Booklet smartcity sebagai media penyebarluasan informasi	1 paket	47.200.000
		Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	Tersedianya Aplikasi Database Komunikasi yang Update dan Optimal	1 aplikasi	35.450.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Tersedianya sistem keamanan informasi	3 paket	136.608.000

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)	Tersusunnya Regulasi TIK	3 Dokumen	1.429.550
		Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor	Terpelihara dan Tersedianya CCTV di lingkungan Balaikota dan Kawasan Publik	13 titik	353.273.510
		Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 68 Kelurahan, 6 Kecamatan dan 1 Tingkat Kota	75 kelompok	63.417.000
		Pembangunan Wifi ruang publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	5 titik	59.262.000
		Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	1 paket	88.200.000
		Penilaian Index E-Government Indonesia	Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE	3.13 index	33.588.200
		Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse	Tersedianya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	1 paket	36.040.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektor	Terselenggaranya Forum Data Statistik Sektor	5 kali	4.378.000
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	21.229.000
		Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD	50 orang	8.829.000
		Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	100 orang	12.400.000
			JUMLAH		9.808.639.589

Tabel 6.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2020		
			Target	Rp.	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika					
I	Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Hasil Penilaian SPBE	2.92 Indeks	23.742.000.000	Diskominfo
		Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	14%	10.000.000.000	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85%	1.560.000.000	
		Persentase Keterbukaan Informasi publik	100%	1.200.000.000	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2020		
			Target	Rp.	
1	Kegiatan: Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE	Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,92 Indeks	125.000.000	Diskominfo
		Hak Akses terhadap 103 Aplikasi dan akan terus bertambah setiap tahunnya	2 Hak akses		
2	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	Tersedianya keberlangsungan pengelolaan website Kota Bogor (colocation)	12 Bulan	500.000.000	Diskominfo
		Tersedianya outsourching pengelolaan website Kota Bogor	1 Orang		
		Terpeliharanya keberlangsungan server domain Kota Bogor	1 Paket		
3	Kegiatan : Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik	Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE	2 Perwali	17.000.000	Diskominfo
4	Kegiatan : Relokasi dan revitalisasi ruang kendali jaringan dan server	Tersedianya ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	10.000.000.000	Diskominfo
5	Kegiatan : Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	3 Paket	1.000.000.000	Diskominfo
		Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server	1 Paket		
6	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	Terpeliharanya Perangkat ruang kendali jaringan dan server	1 Paket	600.000.000	Diskominfo
		Tersedianya outsourching ruang kendali jaringan dan server	1 Paket		
		Tertata dan terkelolanya ruang kendali jaringan dan server	1 Paket		
		Tersedianya DED Ruang Kendali Jaringan dan Server	1 Paket		
7	Kegiatan : Pengelolaan Data Recovery Center (DRC)	Tersedianya DRC	1 Paket	450.000.000	Diskominfo
		Terpeliharanya perangkat data recovery center (DRC)	1 Paket		
		Tersedianya perangkat server	1 Paket		
8	Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	Tersedianya jaringan FO di Perangkat Daerah	10 titik	2.000.000.000	Diskominfo
9	Kegiatan : Pembangunan Wifi Ruang Publik	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	10 titik	200.000.000	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2020		
			Target	Rp.	
10	Kegiatan : Pemeliharaan Jaringan intranet dan internet (backbone) Kota Bogor	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se - Kota Bogor	146 titik	2.000.000.000	Diskominfo
11	Kegiatan : Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	Terpeliharanya wifi ruang publik	50 titik	150.000.000	Diskominfo
12	Kegiatan : Pemeliharaan Grounding listrik dan erester	Terpeliharanya Grounding listrik dan erester Perangkat Daerah dan Kelurahan	8 titik	200.000.000	Diskominfo
13	Kegiatan: Pengelolaan Bandwith	Tersedianya bandwith internet se - Kota Bogor	1000 Mbps	5.000.000.000	Diskominfo
14	Kegiatan : Pengadaan CCTV Kota Bogor	Jumlah titik CCTV	15 titik	800.000.000	Diskominfo
15	Kegiatan : Pemeliharaan CCTV Kota Bogor	Jumlah titik CCTV	58 titik	500.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Outsourching Operator CCTV	1 Orang		
16	Kegiatan : Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor	Terpeliharanya perangkat teleconference	1 Paket	200.000.000	Diskominfo
		Tersedianya perangkat teleconference	1 Paket		
		Tersedianya lisensi ID Teleconference	1 Paket		
17	Kegiatan : Pengembangan dan pengelolaan Bogor Green Room dan Command Center, Server Data dan Aplikasi	Terpeliharanya Perangkat multimedia Bogor Green Room/ Command Center	1 Paket	1.500.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Outsourching Operator Bogor Green Room	1 Paket		
		Terbangunnya dan Meningkatnya Fasilitas Command Center	2 lokasi		
		Tersedianya PC dan Speaker aktif penunjang VideoWall	1 Paket		
18	Kegiatan : Pemindahan dan penataan ulang infrastruktur Command Center (Bogor Green Room) (APBD Provinsi)	Tersedianya command center yang memenuhi standar minimal sebagai Command Center, Monitoring center, dan Crisis Center	4 Paket	5.500.000.000	Diskominfo
19	Kegiatan : Digitalisasi Profil dan Pengembangan/promosi ekosistem e-government dan smart city	Tersedianya reklame untuk promosi smart city	1 paket	940.000.000	Diskominfo
		Tersedianya master plan smart city	1 Dokumen		
		Tersedianya master plan e-government	1 Dokumen		
		Tersedianya anjungan promosi	7 Set		
20	Kegiatan : Pengembangan datawarehouse dan sistem informasi kota (SIMATA)	Tersedianya Paket Pengembangan Datawarehouse	1 paket	800.000.000	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2020		
			Target	Rp.	
21	Kegiatan : Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi	Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	2 pertemuan	60.000.000	Diskominfo
22	Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Aplikasi Layanan e- Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo	3 Aplikasi	1.200.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Outsourcing Programer pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket		
		Tersedianya Outsourcing desainer pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket		
		Tersedianya Outsourcing surveyor pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket		
		Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi	1 Paket		
		Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel	1 Paket		
		Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor	1 Paket		
		23	Kegiatan : Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi		
Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kreatif dan Inovatif	75 kelompok				
Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat	1 Lomba				
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	11 Orang				
Tersebaranya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	4 Medsos (Internal & External)				
Tersedianya Peralatan studio Video dan Film	1 paket				
Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	120 Buah				
24	Kegiatan : Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia	Tersedianya Booklet Smartcity	1 paket	200.000.000	Diskominfo
Terpeliharanya hologram	1 paket				
Tersedianya Brosur/Leaflet	1 paket				
Tersedianya APK Mobily Smartcity	1 paket				
Terkelolanya website dan media sosial	1 paket				
Lomba Karya Jurnalis	1 Kali				

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2020		
			Target	Rp.	
25	Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket	1.560.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Operator pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat	14 Org		
		Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengaduan Masyarakat	1 paket		
		Tersedianya server Aplikasi layanan Pengaduan masyarakat	1 Unit		
		Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra	1 paket		
II	Program : Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55%	641.000.000	Diskominfo
1	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID	Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu	40 Lembaga	97.000.000	Diskominfo
		Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	1 Dokumen		
		Workshop KIP	1 Kali		
2	Kegiatan : Penguatan Hubungan Kelembagaan Masyarakat	Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor	1 Kali	544.000.000	Diskominfo
		Forum Perhumas	1 Kali		
		Keikutsertaan dalam Bakohumas TK. Provinsi dan TK. Nasional	2 Kali		
III	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	1.280.000.000	Diskominfo
1	Kegiatan : Pengelolaan Rumah Tangga PD	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	1.280.000.000	Diskominfo
IV	Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80%	1.343.000.000	Diskominfo
1	Kegiatan : Pengadaan Inventaris Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	80%	325.000.000	Diskominfo
2	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	80%	1.018.000.000	Diskominfo
V	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B	30.000.000	Diskominfo
1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	30.000.000	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2020		
			Target	Rp.	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik					
VI	Program :	Persentase	70%	3.800.000.000	Diskominfo
	Penyelenggaraan	ketersediaan data			
	Statistik Sektoral	statistik sektoral			
1	Kegiatan :	Tersedianya indikator	7 Indikator	1.900.000.000	Diskominfo
	Pengelolaan Statistik	statistik sektoral			
	Sektoral	Tersusunnya Data	1 Paket		
		Indeks Ketahanan			
		Keluarga			
2	Kegiatan :	Terselenggaranya satu	1 data	1.400.000.000	Diskominfo
	Satu Data Statistik	Data Statistik Sektoral	statistik		
	Sektoral		sektoral		
3	Kegiatan :	Tersedianya hasil	2 media	500.000.000	Diskominfo
	Penyajian Statistik	produk Data Statistik			
	Sektoral	Sektoral yang			
		dipublikasikan			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian					
VII	program :	Indeks Keamanan	Level 1	1.900.000.000	Diskominfo
	Penyelenggaraan	Informasi (Indeks			
	Pengamanan Informasi	KAMI)			
	Pemerintah Daerah				
1	Kegiatan :	Tersedianya Dokumen	1 Paket	1.600.000.000	Diskominfo
	Pengembangan dan	Sistem Keamanan			
	Pengelolaan Keamanan	Informasi	1 Paket		
	Informasi dan	Tersedianya Sistem	1 Paket		
	Persandian	Anti Virus	164 Orang		
		Tersosialisasinya			
		Keamanan Informasi	1 Paket		
		Tersedianya Firewall	1 Paket		
		Tersedianya Software	1 Paket		
		berlisensi			
		Tersedianya SSL	1 Paket		
		Tersedianya Aplikasi	1 Paket		
		Tanda Tangan			
		Elektronik Pada E			
		surat Diskominfo			
2	Kegiatan:	Penyelenggaraan Audit	1 Paket	300.000.000	Diskominfo
	Audit Sistem Informasi	Sistem Elektronik per			
	dan Evaluasi Status	tahun dengan			
	Aplikasi di Tingkat	pertimbangan bahwa			
	Perangkat Daerah	setiap tahunnya akan			
		ada penambahan dan			
		pengembangan aplikasi			

Tabel 6.3
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Bogor Tahun 2020

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika					
I	Program :	Nilai aspek Kebijakan	2,71 Indeks	197.000.000	Diskominfo
	Aplikasi Informatika	Internal Tata Kelola			
		SPBE			
		Nilai aspek Perencanaan	3,0 Indeks	125.000.000	
		Strategis SPBE			
		Nilai aspek Teknologi	2,33 Indeks	16.300.000.000	
		Informasi dan			
		Komunikasi			
		Nilai aspek Penerapan	2,7 Indeks	1.940.000.000	
		Manajemen SPBE			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
1	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Pemerintah Kota Bogor	100%	500.000.000	Diskominfo
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	100%	9.650.000.000	
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3		
		Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	level 3		
	Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Persentase Domain dan Subdomain yang terkelola	100%	500.000.000	Diskominfo
		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan IP address versi 6 (Ipv6)	1Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Jaringan Fiber Optik di Perangkat Daerah	10 titik	2.000.000.000	Diskominfo
		Jumlah Titik Wifi Publik	5 titik	100.000.000	
		Jumlah Titik Jaringan Intranet dan Internet pada Perangkat Daerah se Kota Bogor yang dipelihara	146 titik	2.100.000.000	
		Jumlah Wifi Publik yang dipelihara	5 titik	175.000.000	
		Jumlah grounding listrik dan erester yang dipelihara	7 titik	175.000.000	
		Jumlah Kapasitas Bandwidth Internet di Kota Bogor	1100 Mbps	5.100.000.000	
	Kegiatan : Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3	-	Diskominfo
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	level 3		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	level 3		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	level 3		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 3		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	level 3		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	level 3		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3	125.000.000	
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3	197.000.000	
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 3		
		Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	level 3		
		Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	level 3		
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	level 3		
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	level 3	2.350.000.000	
		Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Tahun	1.000.000.000	
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	level 3	1.600.000.000	
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	level 3	1.200.000.000	
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level 2	1.000.000.000	
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	level 3	940.000.000	
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	level 3	-	
	Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah regulasi eGovernment yang terbit	2 Perwali dan SOP	NA	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
	Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah peserta Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun	3 Pertemuan	197.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Sertifikasi ISO	-		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya DRC	1 Paket	2.350.000.000	Diskominfo
		Terkelolanya Perangkat Pusat Data	7 Paket		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terpeliharanya perangkat teleconference	1 Paket	200.000.000	Diskominfo
		Tersedianya perangkat teleconference	1 Paket		
		Tersedianya lisensi ID Teleconference	1 Paket		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah pengadaan titik CCTV	10 titik	800.000.000	Diskominfo
		Jumlah titik CCTV yang dipelihara	20 titik	600.000.000	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi Layanan e- Government yang dibangun/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo	3 Aplikasi	1.200.000.000	Diskominfo
		Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi	-		
		Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel	1 Paket		
		Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor	1 Paket		
		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Datawarehouse	-		
		Tersedianya Sewa Layanan Colocation Server Webmail Kota Bogor	1 Tahun		
		Tersedianya Layanan Cloud Simral Kota Bogor	-		
		Tersedianya Pendampingan SIMRAL	-		
		Tersedianya Aplikasi Dashboard khusus covid	1 Aplikasi		
		Tersedianya Memory Server	5 unit		
		Tersedianya Harddisk Server	2 Unit		
		Tersedianya Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kota Bogor	-		
		Tersedianya Perangkat Pendukung Pengembangan Aplikasi	1 Unit		
		Tersedianya Workshop Integrasi	1 Pertemuan		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terpeliharanya Server Datawarehouse	1 Paket	1.000.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Pengembangan Aplikasi Dashboard Pemerintah	1 Paket		
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terpeliharanya anjungan untuk promosi	-	940.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Sarana Komunikasi Digital	1 Paket		
		Terselenggaranya FGD Smart City dan Sosialisasi Smart City	-		
		Terselenggaranya Pameran Smart City	-		
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center	1 Paket	1.000.000.000	Diskominfo
		Terbangunnya dan Meningkatnya Fasilitas Command Center	-		
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	laporan monev penilaian mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97 Indeks	125.000.000	Diskominfo
2	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi publik	63%	7.860.000.000	Diskominfo
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	85%	4.344.000.000	Diskominfo
		Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	65%	1.406.000.000	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85%	2.110.000.000	
		Persentase PPID PD yang aktif	85%		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Booklet Smart City	1 Paket	37.000.000	Diskominfo
		Ketersediaan perangkat penunjang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1 Paket	42.000.000	
		Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan(konten)	365 konten	355.000.000	
		Lomba Karya Jurnalis	1 Kegiatan	63.000.000	
		Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	2 Kegiatan	69.000.000	
		Jumlah Video	24 konten / tayangan	840.000.000	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Hal Pelayanan Informasi Publik	36 Jumlah Perangkat Daerah	2.110.000.000	Diskominfo
Tersusunnya Laporan PPID		40 Lembaga			
Presentase terpeliharanya Aplikasi sibadra dan sarana penunjang		80%			
	Sub kegiatan: Layanan Hubungan Media	Jumlah penyebaran informasi melalui media TV untuk masyarakat Kota Bogor dan Radio	12 Konten	4.344.000.000	Diskominfo
Jumlah Kerjasama dengan media		180 orang			
Jumlah penyebaran informasi melalui advetorial disurat kabar		4 Jenis media(online nasional, online lokal,cetak lokal, elektronik Tv dan radio)			
Jumlah kegiatan diseminasi informasi melalui media massa		120 meter			
3	Program : penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB	30.000.000	Diskominfo
		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	85%	699.000.000	
		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	14.870.000.000	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	30.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	30.000.000	Diskominfo
	kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	9.428.000.000	Diskominfo
	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	9.428.000.000	Diskominfo
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	661.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	14.000.000	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	340.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	26.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	281.000.000	Diskominfo
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.290.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	500.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhiya sarana dan prasarana kantor lainnya	4 Paket	80.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	1.710.000.000	Diskominfo
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.491.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	100%	12.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 orang	2.479.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat	13 orang		
		Tersedianya outsourching Operator bogor green room	1 paket		
		Tersedianya Outsourcing CCTV	1 paket		
		Tersedianya Outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	1 paket		
		Tersedianya Outsourcing Jaringan Infrastruktur	1 paket		
		Tersedianya Outsourcing Pengelola Media Komunikasi Publik	8 orang		
		Tersedianya Outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	1 paket		
		Tersedianya Outsourcing Pusat Data	1 paket		
		Tersedianya Pengelola	2 orang		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
		Portal Data			
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	2 orang		
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	699.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	295.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Paket		
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1 Paket	54.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Pemeliharaan Komputer-Komputer	1 Paket		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Konsultasi Perencanaan	2 Paket	350.000.000	Diskominfo
		Tersedianya Jasa Konsultasi Pengawas	2 Paket		
		Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2 Paket		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik					
4	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	76%	143.000.000	Diskominfo
		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	0,2%	83.000.000	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	76%	43.000.000	Diskominfo
		Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	76%	83.000.000	
		Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	1 paket	100.000.000	
	Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral	Buku induk statistik sektoral	1 data statistik sektoral	83.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur	Jumlah hardware dan software yang tersedia sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	1 paket	100.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/Bintek/Wor kshop/ Seminar bagi	100 orang	43.000.000	Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024		Perangkat Daerah
			2021		
			Target	Rp.	
	Statistik Daerah yang Terintegrasi	SDM Perangkat daerah			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya satu data statistik sektoral	2 Paket	163.000.000	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian					
5	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	1.100.000.000	Diskominfo
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	80	900.000.000	Diskominfo
		Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email kota bogor)	25%	200.000.000	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	presentase insiden keamanan informasi yang ditindaklanjuti	100%	800.000.000	Diskominfo
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yg sudah menerapkan tanda tangan digital/sertifikat elektronik	9 perangkat Daerah	100.000.000	Diskominfo
		Jumlah aplikasi yg telah di deteksi kerentanan keamanan informasi	1 Aplikasi	100.000.000	Diskominfo
		Jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	150 Orang	100.000.000	Diskominfo

Tabel 6.4
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	CAPAIAN				Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2026					KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											2018	2019	2020	2021	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target	Rp. (dim Juta)	Target			Rp. (dim Juta)	
																									2018
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran 1 : Tersedianya data statistik sektoral							Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	A	A		A		A					Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor	
								Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	%	NA	NA	NA	82	79		82		85		85			Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor	
		2	20	02				Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	NA	76	82	79	400	82	1.400	85	1.550	85	3.570		Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor
									Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	NA	NA	NA	0,4	0,3	115	0,4	1.950	0,5	2.090	0,5	4.365		Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor
		2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	%	NA	NA	NA	82	79	250	82	1.000	85	1.100	85	2.470		Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor
									Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	%	NA	NA	NA	82	79	115	82	1.950	85	2.090	85	4.365			
									Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	paket	NA	NA	NA	1	1	150	1	400	1	450	1	1.100			
		2	20	01	1	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	NA	NA	NA	NA	2	-	1	1.700	1	1.790	1	3.490			
									Terselenggaranya satu data statistik sektoral	paket	NA	NA	NA	NA	2										
		2	20	02	2	01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	NA	NA	NA	NA	142	250	80	500	80	550	80	1.343			
									Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan	%	NA	NA	NA	100	75		NA	NA	NA	NA	NA				
		2	20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	115	1	250	1	300	1	748			
									- Tersusunnya Buku Induk Statistik - Tersusunnya metadata statistik sektoral	Paket Paket	NA	NA	NA	1	1		NA	NA	NA	NA	NA				
		2	20	02	2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	NA	NA	NA	NA	80	250	80	500	80	550	80	1.300			
									Jumlah produsen data (PD) yang dimonitor dan dievaluasi kapasitasnya dalam penyediaan data	OPD	NA	NA	NA	NA	35		NA	NA	NA	NA	NA				
		2	20	02	2	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	NA	NA	NA	1	2	150	2	300	2	350	2	900			
									Jumlah hardware dan software yang tersedia sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	paket	NA	NA	NA	2	1		NA	NA	NA	NA	NA				
		2	20	03	3	01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	NA	NA	NA	NA	-	-	1	100	1	100	1	200			
		Sasaran 2 : Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi						Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2		Level 2		Level 2		Level 2			Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor	
	2		21	02				Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	1.660	Level 2	1.810	Level 2	2.100	Level 2	8.370		Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	KONDISI AWAL	CAPAIAN				Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2026					KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
												2018	2019	2020	2021	Target	2022	2023	2024	Target	Rp. (dlm Juta)	Target			Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)
																	Rp. (dlm Juta)	Rp. (dlm Juta)	Rp. (dlm Juta)								
		2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	%	NA	NA	NA	80	81	1.560	82	1.560	83	1.700	83	7.620	Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor			
		2	21	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	-	-	1	-	1	-	1	-					
		2	21	02	2	01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	NA	NA	NA	NA	1	60	1	60	1	100	1	220					
		2	21	02	2	01	02	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1												
		2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	NA	NA	NA	NA	1	1.200	4	1.200	4	1.300	4	4.500					
		2	21	02	2	01	03	- Tersedianya Antivirus - Tersedianya Firewall - Tersedianya Software (Ms Office) - Tersedianya SSL - Tersosialisasinya Keamanan Informasi	Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Orang	NA NA NA NA NA	NA NA NA NA NA	12 1 5 1 NA	12 1 5 1 150														
		2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	36	300	36	300	36	300	36	1.200					
		2	21	02	2	01	04	- Jumlah PD yg sudah menerapkan tanda tangan digital/sertifikat elektronik - Jumlah aplikasi yg telah di deteksi kerentanan keamanan informasi - Jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	Perangkat Daerah Aplikasi Orang	NA NA NA	NA NA NA	NA NA NA	NA NA NA	13 1 150													
		2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email kota bogor)	%	NA	NA	NA	NA	27,27	100	30,55	250	46,14	400	46,14	750	Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor			
		2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	9	100	11	250	14	400	14	750					
	Sasaran 3 : Meningkatnya KualitasTatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah							Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	nilai	NA	NA	NA	NA	80,01		81		82		82		Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor			
		2	16	01					Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	nilai	B	BB	BB	A	A	30	A	30	A	30	A	150	Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor		
		2	16	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	nilai	B	BB	BB	A	A	30	A	30	A	30	A	150	Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor		
		2	16	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	4	4	30	7	30	7	30	7	150				

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	CAPAIAN					Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2026					KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											2018	2019	2020	2021	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)	Target			Rp. (dlm Juta)	
											(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
								Daerah	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan laporan perangkat Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	4	4												
		2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	NA	NA	NA	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-			
		2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	NA	NA	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-			
		2	16	01				Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	point	NA	NA	NA	NA	3,40	18.955	3,45	22.880	3,50	26.426	3,50	92.208			Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor	
		2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	NA	100	100	100	100	11.314	100	13.576	100	16.292	100	58.983					
		2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	NA	686	686	686	700	11.314	700	13.576	700	16.292	700	58.983					
								Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Per Tahun	NA	1	1	1	1												
		2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	NA	NA	NA	NA	348	-	348	-	348	-	348	-	348	-			
		2	16	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaa	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
		2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentasi pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	NA	NA	100	100	100	-	100	-	100	-	100	2					
		2	16	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-					
		2	16	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	2	2					
		2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	NA	NA	12	-	12	-	12	-	24	-					
		2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	4			Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor	
		2	16	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	2					
		2	16	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	2	2					
		2	16	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	NA	NA	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-					
		2	16	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	NA	1	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-					
		2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	NA	NA	49	49	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-			
		2	16	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Orang	NA	NA	49	49	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-			

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	KONDISI AWAL	CAPAIAN				Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2026					KONDISI AKHIR		(19)	(20)			
												2018	2019	2020	2021	Target	2022	2023	2024	Target	Rp. (d/m Juta)	Target			Rp. (d/m Juta)	Target	Rp. (d/m Juta)
																	Rp. (d/m Juta)	Target	Rp. (d/m Juta)								
		2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	NA	NA	NA	100	100	2.940	100	3.234	100	3.558	100	12.223	Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor			
		2	16	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	NA	NA	NA	1	1	-	1	-	1	-	1	-					
		2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	NA	NA	NA	1	1	13	1	15	1	16	1	56					
		2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	NA	NA	1	1	1	2.927	4	3.220	1	3.542	2	12.167					
								Tersedianya jasa komunikasi	%	100	100	100	100	100													
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	NA	4	4	6	6													
								Tersedianya Operator BGR, CC Wali Kota dan Wakil Wali Kota	orang	NA	NA	NA	6	6													
								Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat	orang	NA	NA	NA	13	13													
								Tersedianya Pengelola Admin Website Kota Bogor	orang	NA	NA	NA	NA	2													
								Tersedianya Pengelola Aplikasi Pemerintah Kota Bogor	orang	NA	NA	NA	NA	1													
								Tersedianya Pengelola Aplikasi Website Kelurahan	orang	NA	NA	NA	NA	1													
								Tersedianya Pengelola Aplikasi Website Puskesmas	orang	NA	NA	NA	NA	1													
								Tersedianya Pengelola Media Komunikasi Publik	orang	NA	NA	NA	8	10													
								Tersedianya Pengelola Portal Data	orang	NA	NA	NA	2	2													
								Tersedianya Pengelola Web Design Pengembangan Aplikasi	orang	NA	NA	NA	NA	2													
								Tersedianya Pengelola Website Perangkat Daerah	orang	NA	NA	NA	NA	2													
								Tersedianya Tenaga Non ASN CCTV	orang	NA	NA	NA	2	2													
								Tersedianya Tenaga Non ASN Jaringan	orang	NA	NA	NA	5	5													
								Tersedianya Tenaga Non ASN Pusat Data	orang	NA	NA	NA	3	3													
								Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi	orang	NA	NA	NA	NA	2													
		2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD	%	100	100	100	100	100	1.360	100	1.499	100	1.649	100	5.207	Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor			
		2	16	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	NA	13	13	13	13	301	13	334	13	367	13	1.297					
								Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	paket	NA	1	1	1	1													
								Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	paket		1	1	1	1													
		2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	NA	NA	NA	NA	50	59	50	65	50	72	50	250					

Tujuan	Sasaran	kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	CAPAIAN				Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2026					KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										2018	2019	2020	2021	Target	2022	2023	2024	Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)			Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)
										(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	(20)		
							Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	level	NA	NA	NA	Level 4	level 3						level 4								
		2	16	3	2	02	01	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	NA	NA	NA	-	2	20	2	30	2	40	2	90	Diskominfo Kota Bogor	Kota Bogor				
		2	16	3	2	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	NA	NA	NA	3	2	250	2	320	2	390	2	1.234						
		2	16	3	2	02	03	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Paket	NA	NA	NA	1	1	2.650	4	2.775	4	2.875	4	12.700						
		2	16	3	2	02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	1	1	200	1	200	1	200	1	1.000						
		2	16	3	2	02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	NA	NA	NA	-	1	200	1	200	1	200	2	600						
		2	16	3	2	02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	5	1.500	5	1.600	5	1.700	5	7.500						
		2	16	3	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Unit	NA	NA	NA	4	8	1.400	8	1.400	8	1.400	8	6.600						

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	CAPAIAN				Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2026					KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
												2018	2019	2020	2021	Target	2022	2023	2024	Target	Rp. (dlm Juta)	Target			Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dlm Juta)
																	Rp. (dlm Juta)	Rp. (dlm Juta)	Rp. (dlm Juta)								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
								media sosial dan website																			
								Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	NA	NA	78	85	90	2.670	95	3.030	100	3.202	100	12.669						
								Persentase PPID PD yang aktif	%	NA	NA	NA	85	90	-	95	-	100	-	100	-						
		2	16	02	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	-	1	-	1	-	2	-						
		2	16	02	2	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	-	1	-	1	-	2	-						
		2	16	02	2	01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	-	1	-	1	-	2	-						
		2	16	02	2	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	-	1	-	1	-	2	-						
		2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	NA	NA	NA	NA	3	1.654	3	2.074	3	2.084	3	7.218						
								Tersedianya Booklet Smart City	buku	NA	NA	NA	300	1													
								Ketersediaan perangkat penunjang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Paket	NA	NA	NA	-	1													
								Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan(konten)	konten	NA	NA	NA	-	365													
								Lomba Karya Jurnalis	Kegiatan	NA	NA	NA	-	1													
								Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kegiatan	NA	NA	NA	-	2													
								Tersedianya Leaflet Media Penyebaran Informasi	lembar	NA	NA	NA	-	197													
								Konten Audio Visual di Multimedia dan Media Sosial	konten	NA	NA	NA	24	24													
		2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	2.670	1	3.030	1	3.202	2	11.012						
								Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu	Lembaga	NA	NA	NA	-	44													
								Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Dokumen	NA	NA	NA	1	1													
								Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra	Paket	NA	NA	NA	1	1													
		2	16	02	2	01	07	Layanan Hubungan Media	Layanan	NA	NA	NA	4	4	4.400	4	5.080	4	5.500	4	19.324						
								Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online	Tahun	NA	NA	NA	1	1													
								Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan	Tahun	NA	NA	NA	1	1													
		2	16	02	2	01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	-	1	-	1	-	2	-						
		2	16	02	2	01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	-	1	-	1	-	2	-						
		2	16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Orang	NA	NA	NA	NA	10	-	10	-	10	-	10	-						
		2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	-	1	-	1	-	2	-						

Tujuan	Sasaran	kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	CAPAIAN				Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2026						KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
												2018	2019	2020	2021	Target	2022	2023	2024		Target	Rp. (djm Juta)	Target			Rp. (djm Juta)	Target
											Rp. (djm Juta)						Target	Rp. (djm Juta)	Target	Rp. (djm Juta)							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		2	16	02	2	01	13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	NA	NA	NA	4	-	-	20	1.829	20	2.334	40	4.163					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, yaitu

- Visi** : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga
- Misi Kedua** : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas,
- Tujuan Kedua** : Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government).
- Sasaran kesatu** : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
- Sasaran kedua** : Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City).

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor memiliki Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Tujuan 1** : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- Sasaran 1 : Tersedianya data statistik sektoral
- Sasaran 2 : Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah
- Tujuan 2** : Peningkatan kualitas smart government

Sasaran : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah ditentukan dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran yang menjadi indikator kinerja Utama (IKU) dari Perangkat Daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan informatika memiliki 2 indikator tujuan dan 5 IKU.

Selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan, Dinas komunikasi dan informatika juga memiliki indikator kinerja kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang diampunya yaitu urusan Komunikasi dan Informatika sebanyak 7 IKK, urusan statistik sebanyak 6 IKK dan urusan Persandian sebanyak 2 IKK.

Adapun pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 2 indikator, program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki 1 indikator, program penunjang urusan Perangkat Daerah memiliki 2 indikator, progam Pengelolaan Aplikasi dan Informatika memiliki 4 indikator dan program Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki 1 indikator.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019 - 2024.

No	URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Capaian			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persen	71,81	71,81	72,69	70	74,45	75,33	75,33	75,33
URUSAN STATISTIK										
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	ada/tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	N/A	NA	100	100	100	100	100	100
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	N/A	NA	100	100	100	100	100	100
URUSAN PERSANDIAN										
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	NA	NA	20	30	60	70	80	80
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	79	79	79	80	81	82	83	83
IV INDIKATOR PROGRAM										
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	NA	76	82	79	82	85	85
2	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	NA	NA	NA	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5
3	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	nilai	B	BB	BB	A	A	A	A	A
5	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	point	NA	NA	NA	3,11	3,4	3,45	3,5	3,5
6	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Index	NA	2,29	2,29	3,1	2,72	2,73	2,74	2,74

No	URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Capaian			Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Index	NA	3	3	2,5	3,1	3,2	3,3	3,3
8	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	index	NA	NA	NA	3,25	2,34	2,35	2,36	2,36
9	Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Index	NA	NA	NA	2,63	2,8	2,9	3,0	3,0
10	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level	NA	NA	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif

Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut melalui berbagai teknik analisis, salah satu diantaranya analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Dan Kepala Perangkat Daerah harus melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Kota Bogor untuk sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Demikian penyusunan perubahan Renstra Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 agar dapat dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

**WALI KOTA BOGOR,
TTD
BIMA ARYA**